

**INSTITUSIONALISASI PARADIPLOMASI GYEONGSANGBUK-DO TERHADAP
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PROGRAM *SAEMAUL UNDONG*
BERDASARKAN KERANGKA VISI MISI DAERAH 2022-2025**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

YUNITA DWI SEPTIANINGRUM

22323218

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

**INSTITUSIONALISASI PARADIPLOMASI GYEONGSANGBUK-DO TERHADAP
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PROGRAM *SAEMAUL UNDONG*
BERDASARKAN KERANGKA VISI MISI DAERAH 2022-2025**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

YUNITA DWI SEPTIANINGRUM

22323218

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2026

HALAMAN PENGESAHAN
INSTITUSIONALISASI PARADIPLOMASI GYEONGSANGBUK-DO TERHADAP
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PROGRAM SAEMAUL UNDONG
BERDASARKAN KERANGKA VISI MISI DAERAH 2022-2025

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat syarat dalam memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

9 Maret 2026

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Kartika Ulami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

1. Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.
2. Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.
3. Alfredha Shinta Putri, S.I.P., M.H.I.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 1 Maret 2026



Yunita Dwi Septianingrum

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala nikmat, karuni, dan rahmat yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan baik. Dalam proses pengerjaan skripsi, penulis menyadari bahwa besarnya bantuan, bimbingan, dan juga dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta hidayah-Nya dalam menjalani proses perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
2. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D.
3. Prof. Dr.rer.soc. Masduki, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A. selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih atas waktu, bimbingan, serta bantuan yang Bapak berikan dalam proses penyelesaian tugas akhir ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan semoga kebaikan Bapak dibalas oleh Allah SWT.
6. Ibu Gustrieni Putri, S.I.P., M.A. selaku Dosen Pembimbing Proposal Skripsi. Terimakasih atas waktu, arahan, dan bantuan yang Ibu berikan selama proses pengerjaan proposal, semoga selalu diberikan kesehatan dan semoga kebaikan Ibu dibalas oleh Allah SWT.
7. Dosen-dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Terimakasih atas ilmu yang diberikan, penjelasan yang disampaikan, dan juga bimbingan yang selalu

dilakukan Bapak Ibu dosen sehingga mempermudah perjalanan mahasiswa dalam menuntut ilmu. Semoga pengorbanan Bapak Ibu dosen mendapatkan balasan dari Allah SWT.

8. Ibu yang selalu menyertakan doa dan dukungan untuk penulis. Terimakasih banyak untuk segala yang telah diberikan, semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki dalam segala bentuk.
9. Kakak perempuan satu-satunya, terimakasih untuk selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki dalam segala bentuk.
10. Sahabat baik saya, Damairya, Ria, Faisya, Monica, dan Fian. Terimakasih untuk dukungan dan ruang yang selalu diberikan kepada penulis dalam segala situasi dan segala hal.
11. Teman terbaik saya, Vikri Aviva Mustaqim yang membersamai penulis mulai dari awal hingga akhir untuk selalu membantu dalam proses pengerjaan tugas akhir ini. Teman baik saya yang membersamai dalam proses pengerjaan tugas akhir ini Syifa dan kak Ima. Untuk teman-teman baik saya di UII, kak Abi, Kak Shania, Ridlo, Fadhil, dan *internal affairs batch 7*. Terimakasih untuk seluruh kebaikan dan waktu kebersamaan yang telah diluangkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Cakupan Penelitian.....	9
1.5 Tinjauan Pustaka.....	10
1.6 Kerangka Pemikiran.....	13
1.7 Argumen Sementara.....	15
1.8 Metode Penelitian.....	17
1.8.1 Jenis Penelitian.....	17
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	17
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....	17
1.8.4 Proses Penelitian.....	17
1.9 Sistematika Pembahasan.....	18
BAB 2 KONTEKS STRATEGIS KERJA SAMA PARADIPLOMASI DIY DAN GYEONGSANGBUK-DO.....	19
2.1 <i>Grand Strategy</i> Pemerintah Daerah DIY dalam Paradiplomasi.....	19
2.2 Kesesuaian Karakteristik DIY dan Gyeongsangbuk-do.....	22
2.3 Arah Kerja sama dalam Kerangka Visi Misi Daerah 2022-2025.....	25
BAB 3 INSTITUSIONALISASI PARADIPLOMASI DALAM KERJA SAMA <i>SISTER PROVINCE</i> DIY DAN GYEONGSANGBUK-DO.....	28

3.1 Upaya Institusionalisasi yang Telah Terlaksana.....	28
<i>3.1.1 Departemen Khusus Pengelola Kerja Sama Internasional.....</i>	<i>28</i>
<i>3.1.2 Kunjungan Resmi Lintas Negara oleh Pemerintah Daerah.....</i>	<i>31</i>
<i>3.1.3 Partisipasi dalam Kegiatan Internasional oleh Mitra Kerja Sama.....</i>	<i>33</i>
<i>3.1.4 Partisipasi dalam Forum Kerja Sama Regional Multilateral.....</i>	<i>36</i>
3.2 Upaya Institusionalisasi yang Belum Terlaksana.....	38
<i>3.2.1 Pendirian Kantor Perwakilan Daerah di Luar Negeri.....</i>	<i>38</i>
<i>3.2.2 Delegasi Pemerintah Daerah dalam Agenda Internasional.....</i>	<i>40</i>
BAB 4 PENUTUP.....	42
4.1 Kesimpulan.....	42
4.2 Rekomendasi.....	43
DAFTAR PUSTAKA.....	45
LAMPIRAN.....	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kesesuaian Karakteristik DIY dan Gyeongsangbuk-do.....	24
Tabel 2. Daftar Kunjungan Oleh Perwakilan Gyeongsangbuk-do ke Provinsi DIY Tahun 2022-2025.....	28

DAFTAR SINGKATAN

BAPPERIDA	: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
DIC	: <i>Decentralised International Cooperation</i>
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
DPMPTSP	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DPPM	: Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
EALRGC	: <i>The East Asia Local and Regional Government Congress</i>
FoY	: <i>Friends of Yogyakarta</i>
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
IT	: <i>Information Technology</i>
KEMENDAGRI	: Kementerian Dalam Negeri
KEMENSETNEG	: Kementerian Sekretariat Negara
KEMLU	: Kementerian Luar Negeri
KSDPL	: Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri
LoI	: <i>Letter of Intent</i>
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PERDA	: Peraturan Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SDM	: Sumber Daya Manusia
SGF	: <i>Saemaul Global Foundation</i>
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UNESCO	: <i>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</i>
UU	: Undang-Undang
YGSI	: Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesia

ABSTRAK

Kerja sama *sister province* antara DIY dan Gyeongsangbuk-do merupakan kerja sama aktif yang sudah berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Kerja sama tersebut dilaksanakan dengan berbagai upaya agar menciptakan hubungan yang berkelanjutan. *Sister province* sebagai bentuk praktik paradiplomasi, penting untuk dikaji bagaimana upaya institusionalisasinya serta bagaimana kerja sama tersebut diarahkan sesuai dengan visi misi pembangunan daerah. Penelitian ini menggunakan teori paradiplomasi oleh Kuznetsov untuk menganalisis bagaimana proses institusionalisasi kerja sama tersebut. Argumen sementara dari penelitian ini adalah bahwa DIY mempunyai *grand strategy* dalam memilih mitra kerja sama serta telah melakukan seluruh upaya institusionalisasi. Namun, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa DIY bukan hanya mempunyai *grand strategy* melainkan juga terdapat PERDA yang menjadi pedoman pelaksanaan kerja sama serta didasarkan oleh kesesuaian karakteristik daerah. Selain itu, ternyata belum seluruh indikator institusionalisasi paradiplomasi terpenuhi secara optimal.

Kata Kunci: *sister province*, paradiplomasi, institusionalisasi, DIY, Gyeongsangbuk-do.

ABSTRACT

The sister province cooperation between the DIY and Gyeongsangbuk-do is an active collaboration that has been ongoing for a long period of time. This cooperation has been implemented through various efforts to create a sustainable relationship. Sister Province as a form of paradiplomacy practice is important to be examined in terms of how its institutionalisation efforts are carried out and how the cooperation is directed in accordance with the regional development vision and mission. This research uses Kuznetsov's paradiplomacy theory to analyze the process of institutionalizing the cooperation. The provisional argument of this research is that DIY has a grand strategy in selecting its cooperation partner and has carried out all institutionalization efforts. However, the finding show that DIY not only has a grand strategy but also possesses a Regional Regulation that serves as a guideline for the implementation of cooperation, which is also based on the compatibility of regional characteristics. In addition, not all indicators of paradiplomacy institutionalization have been optimally fulfilled.

Keywords: sister province, paradiplomacy, institutionalization, DIY, Gyeongsangbuk-do.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman dan pembangunan berkelanjutan, suatu negara akan selalu memiliki masalah yang harus diselesaikan. Hubungan antar negara tentu saja sangat diperlukan dalam upaya penyelesaian masalah tersebut. Pengaruh dari globalisasi saat ini yang tidak hanya berdampak pada isu *high politics* tetapi juga pada isu *low politics*. Hal tersebut kemudian menggambarkan bahwa isu *low politics* yang terdiri dari isu ekonomi, isu lingkungan, dan isu budaya sama pentingnya dengan isu *high politics* yaitu militer dan politik. Oleh karena itu, penting adanya peran dari aktor non-pemerintah serta aktor sub-negara dalam membentuk dinamika hubungan internasional. Pada hal ini praktik paradiplomasi hadir untuk merespon berkembangnya globalisasi (Mukti 2015). Kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat perlu untuk ditingkatkan, maka peran para pemimpin pedesaan sangat penting untuk melaksanakan kebijakan pembangunan pedesaan agar maju (Choi and Kee 2024).

Salah satu isu yang sangat krusial untuk di perhatikan saat ini adalah keamanan ekonomi pada masyarakat kota atau desa. Masyarakat desa yang termasuk cukup tertinggal dalam hal mengikuti arus globalisasi menjadi tantangan tersendiri dalam menciptakan keamanan ekonomi yang stabil dan merata. Sehingga aktor sub-negara atau pemerintah daerah perlu menjalin kerja sama dengan pihak lain untuk membantu mensejahterakan masyarakatnya. Bentuk kerja sama antar kota di tingkat internasional disebut dengan kota kembar atau *sister province* dengan tujuan mempromosikan kebudayaan serta kerja sama ekonomi

yang mulai dikenalkan setelah Perang Dunia II guna membangun persahabatan dan perdamaian (Bintang 2023).

Kerja sama *sister province* di Indonesia mulai giat dilakukan sejak adanya aturan dasar mengenai prosedur pembentukan kerja sama *sister province* tahun 1993 yang kemudian juga disahkan dalam Undang-Undang (UU) No.32 Tahun 2004 (Dewi 2020). Berdasarkan tujuan tersebut dapat dikatakan bahwa manfaat dari adanya kerja sama *sister province* akan banyak menciptakan perubahan serta pembaharuan baik antar kedua kota, yang dimana dapat membantu percepatan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hal ini sangat dibutuhkan untuk negara berkembang guna menjadi alternatif dalam menciptakan pembangunan yang berkala dengan berbagai pengetahuan dan kemampuan yang akan diberikan.

Salah satu daerah di Indonesia yang telah banyak menjalin kerja sama dengan kemitraan luar negeri adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kerjasama *sister province* tersebut telah dijalin dengan berbagai daerah di beberapa negara. Salah satu kerja sama aktif yang dijalin hingga saat ini adalah dengan Korea Selatan yaitu Gyeongsangbuk-do. Kemitraan antara DIY dengan Gyeongsangbuk-do dimulai sejak adanya utusan dari Gyeongsangbuk-do pada tahun 2001 untuk mengunjungi DIY guna meninjau beberapa potensi kerja sama (Dewi 2020). Selanjutnya kerja sama secara resmi dijalin sejak tahun 2003 diawali dengan *Letter of Intent (LoI)* sebagai bentuk komitmen serta diperkuat melalui pembaruan kerja sama pada tahun 2008. Di samping itu, terdapat juga tindak lanjut dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* sebagai dasar hukum pelaksanaan program (Sari et al., n.d.).

Adanya *LoI* dan *MoU* kemudian didukung dengan adanya penegasan kembali komitmen kerja sama yang dijalin atau disebut dengan *reaffirmation of a memorandum of understanding* oleh pemerintah DIY dan pemerintah Gyeongsangbuk-do yang diperbarui setiap 5 tahun dimulai sejak tahun 2015 (Nyong and Lule 2025). Berdasarkan hal tersebut, menunjukkan bahwa kerja sama yang dijalin ternyata bersifat berkelanjutan. Mulainya dijalin kerja sama sejak adanya penjajakan tahun 2001 berlandaskan dengan kesesuaian antar kedua provinsi, antara lain kesesuaian karakteristik, tujuan, serta capaian yang ingin diwujudkan. Namun dalam hal ini terbagi menjadi dua peran yaitu Gyeongsangbuk-do sebagai donatur menyumbang seluruh dana, profesional, serta ide berorientasi pada pengalaman, sedangkan DIY berperan sebagai penerima manfaat dengan kata lain dapat dikatakan juga kepentingan Gyeongsangbuk-do mengarah pada *soft power* (DPMPTSP DIY 2026).

Korea Selatan sendiri atau khususnya Gyeongsangbuk-do telah berhasil menciptakan pemberdayaan desa yang kemudian dipandang oleh dunia internasional sebagai upaya dalam meningkatkan perekonomian dari tingkat yang rendah menjadi salah satu negara maju di dunia (Deniar and Maharani 2022). Hal tersebut menarik perhatian dari berbagai negara di dunia terutama negara berkembang yang tentu sedang berupaya untuk meningkatkan perekonomian negaranya. Adapun program pemberdayaan desa yang berfokus kepada masyarakat sebagai subjek tersebut disebut dengan *Saemaul Undong*.

Saemaul Undong merupakan gabungan kata dari *Saemaul* yang berarti desa baru serta *Undong* yaitu gerakan yang di mana merupakan gagasan dari presiden ketiga Korea Selatan, Park Chung Hee pada awal tahun 1970-an (Deniar

and Maharani 2022). Salah satu alasan mengapa gerakan *Saemaul Undong* mampu diterima dengan baik oleh masyarakat adalah karena melibatkan peran masyarakat secara langsung serta masih tetap mengadopsi nilai-nilai yang berada disana. Program *Saemaul Undong* ini kemudian dipromosikan ke berbagai negara di dunia dengan menekankan komponen utamanya yaitu ketekunan, swadaya, serta kerja sama (Deniar and Maharani 2022).

Kerja sama program *Saemaul Undong* di desa-desa menciptakan semangat gotong royong antar masyarakat dengan adanya interaksi secara langsung sehingga memudahkan tercapainya tujuan yang ingin didapatkan. Tujuan tersebut yaitu adalah meningkatkan taraf hidup untuk rakyat bangkit dari kemiskinan (Deniar and Maharani 2022). Bukan hanya membangkitkan semangat gotong-royong, tetapi berkat adanya partisipasi masyarakat secara langsung dalam pembangunan desa akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Desa yang dipilih menjadi tempat di mana program ini dilaksanakan tidak sekedar berdasarkan riset dari pihak Gyeongsangbuk-do, tetapi juga melibatkan peran pemerintah daerah DIY. Pemilihan desa tersebut difokuskan untuk desa yang dinilai membutuhkan bantuan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program.

Sebagai contohnya berdasarkan data informasi pembangunan daerah kabupaten Gunungkidul yaitu dikategorikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Gunungkidul terendah dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di DIY (Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2022, p 24). Walaupun pada 2017 hingga 2019 kemiskinan yang ada di kabupaten Gunungkidul sempat menurun, tetapi akibat dampak COVID-19 mulai tahun 2020 kembali meningkat

hingga 0,62% pada tahun 2021 (Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2022, p 25). Berdasarkan informasi tersebut jelas bahwa fokus strategi kebijakan demi penanggulangan kemiskinan harus ditingkatkan, sehingga pemerintah dari DIY akan turun langsung guna melakukan survei tempat kemudian dilakukan seleksi dengan pemerintah Gyeongsangbuk-do.

Program kerja sama *Saemaul Undong* ini tidak hanya memberikan bantuan materi tetapi juga menurunkan ahli pada bidang tertentu untuk membantu dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat desa percontohan. Dasar dari nama desa percontohan adalah sebagai contoh untuk desa lainnya yang mengarah pada keberhasilan program pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan perubahan yang ada. Umumnya program ini dilaksanakan selama 5 tahun dengan tahapan serta evaluasi rutin demi mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, melalui program *Saemaul Undong* ini, Indonesia dan Korea Selatan membawa berbagai manfaat yang dinilai signifikan dalam memperkuat hubungan bilateral kedua negara dengan adanya pertukaran budaya melalui festival, kerja sama bisnis, pertukaran pengetahuan, serta promosi pariwisata (Bintang 2023).

Adanya kerja sama antara Gyeongsangbuk-do dengan DIY merupakan upaya untuk mencapai tujuan dalam memenuhi kepentingan nasional masing-masing aktor. Bentuk kerja sama internasional yaitu terdiri dari kerja sama bilateral dan kerja sama multilateral, yang dimana program kerja sama *Saemaul Undong* termasuk dalam kerja sama bilateral antar dua negara. Mengutip dari pandangan Issundari dalam Hasymi dkk, menyebutkan bahwa kerja sama kedua daerah ini terjadi karena kesamaan sistem pemerintahan yaitu menggunakan proses desentralisasi dalam menjalankan *unitary system* (Hasymi et al. 2024).

Adapun empat tujuan dari program *Saemaul Undong* yang dikutip oleh Hasymi dkk berdasarkan pandangan Yi antara lain, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan infrastruktur produksi untuk masyarakat, mengangkat taraf hidup masyarakat, serta meningkatkan kualitas pola pikir masyarakat (Hasymi et al. 2024). Oleh karena itu, program *Saemaul Undong* dipandang relevan sebagai salah satu bentuk upaya pemberdayaan masyarakat desa yang melibatkan kerja sama antara pemerintah daerah DIY dan mitra internasionalnya.

Proses serta implementasi dalam melaksanakan program *Saemaul Undong* ini dibantu oleh adanya Yayasan *Saemaul Global Foundation (SGF)* sebagai perpanjangan tangan dari Gyeongsangbuk-do. Guna mempermudah serta melancarkan dilaksanakannya program ini, SGF kemudian membuka kantor cabang di DIY bernama Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesia (YGSI) (Sari et al., n.d.,). Koordinasi dan komunikasi selama proses dalam program *Saemaul Undong* dilakukan melalui YGSI oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DIY sebagai badan khusus yang menangani Kerja Sama Luar Negeri (KSLN). Oleh karena itu, program *Saemaul Undong* yang merupakan program dari Gyeongsangbuk-do, dikoordinasikan melalui YGSI sebagai perpanjangan tangan di bawah provinsi tersebut.

Berhubungan dengan hal tersebut, dalam periode pemerintahan daerah saat ini pemerintah daerah DIY menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan visi misi pembangunan daerah tahun 2022–2027 yang menekankan pada “Terwujudnya PANCAMULIA masyarakat Jogja melalui reformasi kelurahan, pemberdayaan kawasan selatan, serta pengembangan budaya inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi” (Biro Tata Pemerintahan Setda

Daerah Istimewa Yogyakarta 2024). Namun karena adanya keterbatasan data, penelitian ini kemudian dibatasi pada tahun 2022-2025. Visi misi ini berfungsi sebagai kerangka arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi berbagai program dan kerja sama yang dijalankan oleh pemerintah daerah termasuk dalam penentuan daerah dilakukannya program *Saemaul Undong*. Seperti komponen dari setiap kata yang terkandung dalam visi tersebut menyebutkan adanya prioritas pada reformasi kelurahan dan kawasan selatan dimana menempatkan masyarakat desa sebagai subjek selaras dengan program *Saemaul Undong*.

Tujuan dari program *Saemaul Undong* oleh DIY dan Gyeongsangbuk-do sejak tahun 2015 memiliki kecocokan dengan visi misi DIY khususnya tahun 2022-2025 dengan membantu melakukan reformasi kelurahan serta pengembangan kawasan selatan untuk lebih berdaya secara ekonomi (HUMAS DIY 2025). Meskipun kerja sama *sister province* antara DIY dan Gyeongsangbuk-do telah terjalin sebelum periode visi misi daerah tahun 2022–2025, visi misi tersebut tetap memiliki peran penting dalam memberikan arah dan penyesuaian terhadap keberlanjutan serta implementasi kerja sama yang telah ada. Dengan demikian, kerja sama melalui program *Saemaul Undong* dapat dipahami sebagai bagian dari praktik hubungan luar negeri daerah yang diarahkan agar tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah yang berlaku.

Penyelarasan implementasi program *Saemaul Undong* dengan dokumen strategis daerah yaitu RPJMD 2022-2025, juga berlandaskan hukum dimana DIY mempunyai Peraturan Daerah (PERDA). Lebih tepatnya PERDA DIY Nomor 1 Tahun 2023 yang menjelaskan mengenai aturan bagaimana daerah boleh menjalin

kerja sama dengan daerah lain lintas batas negara (BPK RI 2020). Hal ini kemudian yang menjadi salah satu faktor latar belakang DIY dalam memilih mitra kerja sama. Selain itu, Karakteristik suatu daerah juga mempengaruhi berdasarkan potensi yang dimiliki. Pada hal ini DIY dan Gyeongsangbuk-do sama-sama mempunyai potensi yang serupa, seperti mempunyai daerah perkotaan hingga pedesaan (GONE2KOREA 2025). Sejak dimulainya penjajakan maka masing-masing daerah akan menentukan apakah berpotensi untuk menjalankan suatu kerja sama dengan *profiling* (DPMPTSP DIY 2026). Hal tersebut kemudian akan menjadi pertimbangan penting guna pemilihan mitra yang bermanfaat untuk agenda pembangunan daerah .

Apabila program kerja sama yang dijalankan telah sesuai dengan PERDA serta bernilai strategis, maka penting untuk berusaha mempertahankan hubungan antar mitra agar bersifat *sustain*. Dalam hal ini upaya kedua daerah kemudian penting untuk dilihat. Oleh karena itu, penelitian ini memandang penting untuk menganalisis bagaimana kerja sama *sister province* antara pemerintah daerah DIY dan Gyeongsangbuk-do diinstitusionalisasikan sebagai praktik paradiplomasi, serta bagaimana visi misi daerah DIY 2022–2025 berperan sebagai kerangka arah kebijakan dalam pelaksanaan kerja sama tersebut. Penelitian ini guna melengkapi penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang berjudul “Dampak Kerjasama Luar Negeri Oleh pemerintah daerah Terhadap Peningkatan Keamanan Ekonomi (Studi Kasus: Implementasi Program *Saemaul Undong* di Provinsi Yogyakarta) dimana hanya menganalisis dampak program bagi keamanan ekonomi masyarakat dalam jangka pendek tanpa menjelaskan bagaimana kerja sama tersebut

dilembagakan serta belum menghubungkan dengan visi misi daerah sebagai arah kebijakannya (Hakiem and Amalia 2021).

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana institusionalisasi paradiplomasi Gyeongsangbuk-do terhadap DIY dalam program *Saemaul Undong* berdasarkan kerangka visi misi daerah 2022-2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Terkait dengan rumusan masalah yang telah dituliskan pada bagian sebelumnya, tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana kerja sama *sister province* antara DIY dan Gyeongsangbuk-do melalui program *Saemaul Undong* diinstitusionalisasikan sebagai praktik paradiplomasi dalam kerangka visi misi DIY 2022-2025. Berdasarkan tujuan ini peneliti juga akan menganalisis menggunakan teori yang sesuai yaitu teori paradiplomasi oleh Kuznetsov dalam proses institusionalisasinya.

1.4 Cakupan Penelitian

Penelitian ini fokus membahas mengenai kerja sama *sister province* antara DIY dan Gyeongsangbuk-do dalam program *Saemaul Undong* sebagai program pemberdayaan desa yang berfokus kepada masyarakat sebagai subjek. DIY dipilih menjadi fokus analisis karena dinilai sebagai salah satu daerah yang giat melakukan kerja sama dengan daerah lain dalam lingkup internasional. Lebih khususnya penelitian ini berusaha untuk menganalisis kerja sama *sister province*

antara pemerintah daerah DIY dan Gyeongsangbuk-do melalui program *Saemaul Undong* diinstitusionalisasikan sebagai praktik paradiplomasi. Cakupan analisis penelitian dibatasi pada periode 2022–2025, yang disesuaikan dengan periode implementasi visi misi daerah DIY yang menjadi fokus penelitian. Meskipun visi misi gubernur DIY berlaku hingga tahun 2027, penelitian ini hanya menganalisis pelaksanaan kerja sama hingga tahun 2025 karena keterbatasan ketersediaan data untuk periode selanjutnya.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dikaitkan dengan beberapa penelitian terdahulu seperti jurnal dan bahan bacaan yang membahas mengenai *sister province* sehingga didapatkan kaitannya dengan penelitian ini. Penulis menemukan beberapa literatur relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai tinjauan penelitian. Pertama yaitu penelitian yang ditulis oleh Choi dan Kee (2024) dalam jurnal yang berjudul “*The Nature of Saemaul Undong as a Rural Development Strategy: Topic Modelling and Text Mining Analysis*” menjelaskan bahwa *Saemaul Undong* bukan hanya sekedar gerakan sosial yang hidup dalam masyarakat, tetapi merupakan strategi untuk pembangunan pedesaan agar lebih maju. Lebih lanjut juga disebutkan tiga prinsip utama *Saemaul Undong* antara lain, kepemimpinan lokal yang kuat, dukungan kebijakan pemerintah, serta partisipasi aktif masyarakat (Choi and Kee 2024). Ketiga prinsip utama tersebut sejalan dengan upaya pemerintah daerah DIY dalam mewujudkan visi misi tahun 2022-2025 yaitu pada aspek pembangunan berbasis masyarakat dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat guna mengurangi

kesenjangan desa-kota. Selain itu, ketiga prinsip tersebut menjadi instrumen penting dalam hubungan *sister province* dalam melakukan transfer pengetahuan dan model pembangunan yang terbukti berhasil di Korea Selatan kepada daerah mitra salah satunya DIY. Visi pembangunan provinsi DIY sendiri juga relevan dengan berbagai nilai *Saemaul Undong* yang dimana menekankan pada semangat kerja keras, swadaya, serta disiplin.

Selanjutnya, kedua berdasarkan pada jurnal yang ditulis oleh Hasymi dkk (2024) berjudul “*Analisis Implikasi Kerjasama Sister Province Yogyakarta dan Gyeongsangbuk-do dalam Pembentukan Kota Tangguh Melalui Program Saemaul Undong*” membahas secara langsung bagaimana kerja sama yang dijalin oleh provinsi DIY dan Gyeongsangbuk-do sebagai mitra melalui kerja sama internasional. Pelaksanaan program *Saemaul Undong* dijelaskan bahwa telah memberikan dampak yang nyata pada tingkat desa secara fisik maupun sosial dengan fokus programnya antara lain adalah penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, serta pembangunan lingkungan berkelanjutan. Dampak tersebut dapat dilihat berdasarkan desa-desa percontohan yang menunjukkan terjadinya peningkatan kualitas infrastruktur dasar, penguatan jaringan sosial, dan juga telah muncul kepemimpinan lokal dengan basis komunitas (Hasymi et al. 2024). Kelebihan dari jurnal ini yang telah menjelaskan dampak nyata dari program *Saemaul Undong* dengan menyentuh aspek pembangunan lokal, namun disisi lain jurnal ini lebih menekankan pada konsep “kota tangguh” serta hasil implementasi program *Saemaul Undong* tersebut belum dikaitkan dengan dokumen perencanaan daerah tahun 2022-2025 sebagai kerangka strategis daerah.

Terakhir, yaitu berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Issundari (2024) dengan judul “*Decentralised International Cooperation: Insight from the Yogyakarta (Indonesia) - Gyeongsangbuk-do (Korea Selatan) Partnership*” membahas bahwa konsep *Decentralised International Cooperation* (DIC) mengacu pada kerja sama lintas batas negara antar-pemerintah daerah guna mendukung pembangunan berkelanjutan sehingga hal ini penting untuk mampu mengatasi tantangan lokal yang terkadang tidak semua dapat ditangani oleh pemerintah pusat. DIC dalam kerangka kerja sama *sister province* mendorong kolaborasi yang lebih aktif, adaptif terhadap kebutuhan daerah, serta fleksibel. Berangkat dari hal tersebut, jurnal ini menunjukkan bahwa keberhasilan dari kerja sama yang dilakukan sangat bergantung pada kesiapan institusi pemerintah daerah dan juga pentingnya peran tingkat partisipasi masyarakat yang ternyata juga sejalan dengan prinsip pembangunan provinsi DIY yang partisipatif serta berbasis kemandirian lokal (Issundari 2024). Temuan ini penting untuk menggarisbawahi bagaimana peran penting pemerintah provinsi DIY dan Gyeongsangbuk-do dalam mengelola dinamika kerja sama daerah serta adaptasi program lintas budaya. Tetapi, Issundari lebih fokus pada aspek manajerial dan juga kelembagaan kerja sama tanpa membahas lebih lanjut bagaimana output kerja sama tersebut dapat mendukung arah kebijakan strategis ataupun indikator capaian pembangunan daerah, seperti yang menjadi hal penting dalam visi misi daerah 2022-2025.

Dari ketiga penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian terdahulu telah mengulas aspek implementasi teknis program *Saemaul Undong*, dampak lokal terhadap masyarakat, serta dinamika kelembagaan dalam kerja sama DIY dan Gyeongsangbuk-do. Namun demikian, belum terdapat penelitian yang secara

khusus menganalisis bagaimana kerja sama internasional tersebut dilembagakan sebagai praktik paradiplomasi pemerintah daerah serta bagaimana pelaksanaannya diarahkan dan diselaraskan dengan dokumen strategis pembangunan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis institusionalisasi kerja sama *sister province* antara pemerintah daerah DIY dan Gyeongsangbuk-do melalui program *Saemaul Undong* dalam kerangka visi misi daerah DIY 2022–2025 sebagai arah kebijakan.

1.6 Kerangka Pemikiran

Penulis menggunakan teori paradiplomasi berdasarkan latar belakang kasus dan rumusan masalah yang ingin dijawab. Menurut Aldecoa, Keating dan Boyer, istilah '*paradiplomacy*' yang muncul pertama kali pada tahun 1980-an oleh ilmuwan asal Bosque bernama Panayotis Soldatos, dimana istilah tersebut merupakan gabungan dari '*parallel diplomacy*' mengacu pada makna '*the foreign policy of non-central governments*' (Mukti 2015). Pendapat dari Alexander S. Kuznetsov dalam bukunya yang berjudul "*Theory and Practice of Paradiplomacy*" menjadi dasar dalam memahami teori paradiplomasi yang digunakan.

Paradiplomasi menunjukkan betapa pentingnya peran sub-nasional dalam menganalisis realitas internasional yang kompleks (Alvarez 2020). Hal tersebut selaras dengan pandangan Alexander S. Kuznetsov yang dimana paradiplomasi merupakan sebuah praktik komunikasi politik yang dilakukan secara mandiri oleh sebuah pemerintahan tingkat daerah atau sub-nasional dengan pemerintah asing guna mencapai manfaat ekonomi, budaya, politik, serta manfaat lainnya (Kuznetsov 2015,

p 30-31). Pada dasarnya kepentingan sub-nasional harus diperhatikan dengan tidak hanya fokus pada kepentingan negara saja.

Adanya peningkatan tren kegiatan internasional oleh pemerintah daerah kemudian mendorong Kuznetsov untuk memperkenalkan paradiplomasi guna menggambarkan upaya serta langkah diplomasi pemerintah daerah dalam konteks kerja sama internasional. Berdasarkan pandangan oleh Kuznetsov terdapat enam bentuk upaya atau institusionalisasi pemerintah daerah dalam melakukan paradiplomasi yang menjelaskan secara spesifik bagaimana kegiatan kerja sama lintas batas negara dilakukan oleh pemerintah daerah secara teknis (Kuznetsov 2015, p 111-112). Enam bentuk upaya institusionalisasi tersebut antara lain :

1. Dibentuknya badan khusus dalam pemerintah daerah yang fokus dalam mengatur urusan kerja sama internasional. Pembentukan badan khusus tersebut guna mengkoordinasikan seluruh kebijakan yang disepakati, berbagai program yang dirancang, serta sebagai aktor penting dalam membangun hubungan dengan daerah lintas negara lainnya.
2. Penting untuk membangun kantor subnasional atau perwakilan daerah permanen di luar negeri dengan tujuan semakin mempererat hubungan diplomatik dalam berbagai bidang serta fokus untuk melaksanakan program kerja sama antar kedua daerah.
3. Kuznetsov menjelaskan terkait pentingnya kunjungan resmi pemerintah daerah ke daerah di negara lain yang menjadi mitra kerja samanya. Hal ini selain untuk mengetahui kondisi sosial, juga berguna menggali lebih dalam potensi kerja sama yang dapat dikembangkan selanjutnya.
4. Terlibat atau turut berpartisipasi dalam acara internasional yang diselenggarakan oleh aktor asing seperti adanya forum pameran guna memberi

kesempatan bagi mitra kerja sama untuk memperkenalkan potensi daerahnya begitu sebaliknya.

5. Turut berpartisipasi atau membentuk sebuah jaringan global lintas batas untuk daerah dapat memiliki kesempatan memperluas jaringan diplomatiknya.
6. Keikutsertaan pemerintah daerah sebagai delegasi resmi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah mitra kerja sama untuk menciptakan hubungan yang lebih baik dengan mitra.

Berdasarkan teori paradiplomasi menurut pendapat Kuznetsov yang telah diuraikan tersebut, terdapat korelasi dengan adanya kerja sama *sister province* oleh DIY dan Gyeongsangbuk-do dalam program *Saemaul Undong*. Kerja sama antar daerah melewati lintas batas oleh DIY dan Gyeongsangbuk-do sesuai dengan makna teori paradiplomasi serta telah memenuhi beberapa bentuk upaya institusionalisasi salah satunya sebagai bukti nyata yaitu adanya badan khusus yang mengurus kerja sama luar negeri di DIY serta terdapat kantor resmi Gyeongsangbuk-do di DIY. Sehingga teori tersebut dapat digunakan sebagai kaca mata untuk menganalisis serta menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

1.7 Argumen Sementara

Berdasarkan kerangka pemikiran teori paradiplomasi oleh Kuznetsov, penulis menarik argumen sementara yaitu kerja sama *sister province* antara DIY dan Gyeongsangbuk-do melalui program *Saemaul Undong* dapat dipahami sebagai bentuk praktik paradiplomasi yang terstruktur. Pada hubungan kedua daerah tersebut, sangat terlihat nyata bentuk-bentuk institusionalisasi paradiplomasi seperti yang dijelaskan oleh Kuznetsov, antara lain yang telah dilaksanakan:

- 1.) Pembentukan unit khusus yang mengurus kerja sama luar negeri, di DIY yaitu oleh DPMPTSP DIY.
- 2.) Kunjungan resmi antar mitra kerja sama. Kunjungan ini dilakukan mulai dari peninjauan hingga saat ini dengan pihak Gyeongsangbuk-do yang aktif melakukan kunjungan ke wilayah tempat dilakukannya program *Saemaul Undong*.
- 3.) Partisipasi pada forum yang diagendakan oleh mitra. Kedua provinsi saling menghadiri forum, dengan DIY mempunyai forum Friends of Yogyakarta (FoY) serta Gyeongsangbuk-do dengan pelatihan bahasa Korea.
- 4.) Sama-sama menjadi anggota dari forum regional multilateral yaitu Kongres Nara. Fungsi kongres tersebut sebagai ruang bertukar pengalaman antar daerah dari negara yang berbeda.

Selanjutnya, upaya institusionalisasi yang belum dilaksanakan adalah:

- 1.) Belum mendirikan kantor perwakilan di daerah mitra, karena terdapat peraturan negara yang tidak memperbolehkan pendirian kantor perwakilan tersebut.
- 2.) Belum menjadi delegasi resmi pemerintah pusat untuk menghadiri acara yang diagendakan mitra kerja sama. Namun, kunjungan mandiri daerah telah dilakukan dan wajib melaporkan kepada pemerintah pusat.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode yang bersifat analisis dan deskriptif. Metode ini digunakan untuk dapat memaparkan proses kerja sama DIY dan Gyeongsangbuk-do berdasarkan data yang diperoleh dari literatur.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pemerintah DIY. Sedangkan objeknya mengacu pada program kerja sama *Saemaul Undong* antara DIY dan Gyeongsangbuk-do dalam kerangka visi misi DIY tahun 2022-2025.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan analisis sumber data sekunder seperti jurnal, buku, laporan, website resmi, serta berita yang tervalidasi datanya. Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan sumber data primer dengan melakukan wawancara langsung bersama dengan instansi terkait yaitu Dinas terkait seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DIY, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) DIY, serta wawancara dengan Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesia (YGSI).

1.8.4 Proses Penelitian

Data-data yang telah dikumpulkan baik dari sumber data primer maupun sekunder, akan dikaji secara mendalam dan menjamin kebenaran informasinya untuk

menjadi sumber pokok penulis dalam melakukan penelitian. Selanjutnya dilakukan penyajian data ke dalam narasi berdasarkan hasil penelitian.

1.9 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dibagi menjadi 4 bab guna memudahkan pembahasan, dengan sistematika sebagai berikut:

Pada bab pertama berfokus untuk menguraikan gambaran umum mengenai topik penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan penelitian, kerangka pemikiran, hingga metodologi penulisan.

Pada bab kedua, penulis akan membahas mengenai konteks strategis yang melatarbelakangi pemerintah daerah DIY dalam melaksanakan kegiatan paradiplomasi. Terdapat tiga bagian yang menjadi pembahasan dalam bab ini, yaitu *grand strategy* pemerintah daerah DIY dalam melaksanakan kegiatan paradiplomasi, kesesuaian karakteristik antara DIY dan Gyeongsangbuk-do sebagai mitra kerja sama, dan yang terakhir yaitu arah kerja sama sister province dalam kerangka visi misi daerah DIY 2022-2025.

Pada bab ketiga, berisi analisis terhadap data-data yang telah didapatkan pada bab sebelumnya dengan menggunakan teori paradiplomasi oleh Alexander S. Kuznetsov. Analisis dilakukan guna untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

Terakhir adalah bab keempat yang berisi kesimpulan penelitian dirangkum dalam bentuk poin-poin penting sebagai jawaban dari rumusan masalah serta menjadi bagian akhir dari penelitian ini. Selain itu, pada bab ini juga akan terdapat rekomendasi untuk penelitian selanjutnya agar berguna di masa depan.

BAB 2

KONTEKS STRATEGIS KERJA SAMA PARADIPLOMASI DIY DAN GYEONGSANGBUK-DO

Salah satu bagian dari dinamika hubungan internasional kontemporer yaitu adalah dilakukannya kerja sama internasional oleh pemerintah daerah sebagai aktor subnasional. Dalam hal ini, pemerintah daerah sudah diposisikan sebagai aktor yang memiliki peran strategis dalam menjalin hubungan lintas batas guna mendukung kepentingan serta mendukung pembangunan daerah tersebut. Pada bab ini penulis akan berfokus pada pembahasan subbab yang berkaitan dengan *grand strategy* pemerintah daerah DIY dalam melaksanakan kegiatan paradiplomasi, kesesuaian karakteristik antara DIY dan Gyeongsangbuk-do sebagai mitra kerja sama, dan yang terakhir yaitu arah kerja sama *sister province* dalam kerangka visi misi daerah DIY 2022-2025. Beberapa bagian tersebut sebagai pemahaman mengenai konteks strategis yang melatarbelakangi pemerintah daerah DIY dalam melaksanakan kegiatan paradiplomasi. Pembahasan pada bab ini diharapkan dapat memberikan landasan kontekstual yang kuat untuk menganalisis bentuk institusionalisasi kerja sama paradiplomasi antara kedua daerah pada bab selanjutnya.

2.1 *Grand Strategy* Pemerintah Daerah DIY dalam Paradiplomasi

Paradiplomasi menjadi salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah guna mendukung pembangunan daerah dengan adanya kerja sama internasional antar daerah lintas negara. Secara historis, kewenangan pemerintah daerah untuk dapat melakukan kerja sama internasional tersebut dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai pemerintah daerah

sebagai landasan otonomi daerah. Namun, kewenangan tersebut termasuk dalam kewenangan tidak wajib bagi daerah dan diperbolehkan sepanjang tidak menyangkut kewenangan pemerintah pusat khususnya dalam bidang politik luar negeri seperti yang diatur pada Pasal 88 ayat (1) (Mukti 2013, p 3). Lebih lanjut, ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mana tetap memberikan kewenangan tersebut dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai Pasal 42 ayat (1). Selain itu, kerja sama tersebut boleh dijalin dalam berbagai bentuk *sister province* salah satunya kerja sama teknis dan dalam bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum 2018).

Tidak hanya diatur dalam Undang-Undang negara, namun kerja sama luar negeri daerah DIY juga diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) DIY Nomor 1 Tahun 2023. Peraturan Daerah tersebut menjadi landasan hukum bagi DIY dalam melaksanakan kerja sama luar negeri seperti yang disebutkan pada Bab V Pasal 22 Ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL) setelah mendapat persetujuan Pemerintah Pusat (BPK RI 2020). Pada PERDA tersebut memuat beberapa ketentuan seperti objek KSDPL, syarat pelaksanaan, hingga aturan perencanaan. Salah satu syarat pelaksanaan KSDPL adalah “sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan” yang termuat dalam Pasal 24 Ayat (1) bagian g (BPK RI 2020). Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa rencana pembangunan menjadi salah satu hal penting dalam strategi melakukan KSDPL.

Pemerintah daerah DIY memandang bahwa kerja sama luar negeri atau *sister province* merupakan bagian dari strategi pembangunan daerah yang kemudian diarahkan untuk memperkuat kapasitas lokal dengan meningkatkan kualitas

pembangunan berbasis masyarakat. Adanya kerja sama luar negeri tersebut diposisikan sebagai sarana guna mendukung agenda pembangunan daerah, khususnya pada berbagai sektor yang berhubungan dengan kebutuhan lokal. Berdasarkan hal tersebut, paradiplomasi menjadi instrumen kebijakan yang dimanfaatkan untuk memperoleh lebih banyak pengalaman, pembelajaran, serta penguatan kapasitas kelembagaan daerah.

Oleh karena itu, paradiplomasi pemerintah daerah DIY mempunyai tujuan yang sejalan dengan arah pembangunan daerah sebagaimana yang telah tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan. Arah pembangunan tersebut yaitu guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara diberdayakan, pelestarian, serta pengembangan kebudayaan. Kerja sama luar negeri tidak berdiri secara mandiri, melainkan merupakan gabungan dari kebijakan dan prioritas pembangunan daerah sehingga dapat mendukung keberlanjutan pembangunan daerah dalam jangka panjang.

Kegiatan paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah DIY memiliki prioritas dalam beberapa sektor, seperti yang tercantum dalam dokumen visi dasar RPJMD 2022-2027 yang berbunyi “Terwujudnya PANCAMULIA masyarakat Jogja melalui reformasi kalurahan, pemberdayaan kawasan selatan, serta pengembangan budaya inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi.” (BAPPERIDA DIY 2025). Berdasarkan visi dasar tersebut dan hubungannya dengan praktik paradiplomasi yang dilakukan yaitu keefektifan dalam praktik paradiplomasi yang sangat bergantung pada karakteristik masing-masing daerah seperti kondisi ekonomi, warisan budaya, serta konfigurasi kelembagaan. Lebih lanjut, keragaman regional yang ada menuntut strategi paradiplomasi yang fleksibel dan kontekstual sesuai dengan kekuatan dan tantangan lokal (Syuryansyah, Yunazwardi, and Nihayati 2025, p 156).

Grand strategy paradiplomasi pemerintah daerah DIY dalam menentukan mitra kerja sama tidak dilakukan secara acak, berdasarkan dalam sambutan Gubernur DIY pada buku berjudul “*Bunga Rampai*” disebutkan bahwa salah satu latar belakang agar terjalinnya kerja sama persahabatan yang berkelanjutan, produktif, serta berdampak positif bagi masyarakat yaitu dengan adanya kesamaan akar budaya (Sari et al., n.d., 1). Hal ini tercermin salah satunya pada kerja sama *sister province* yang dilakukan oleh DIY dan Gyeongsangbuk-do, dimana terdapat kesamaan budaya dalam masyarakat yang mana kedua daerah tersebut sama-sama memiliki budaya gotong royong. Dengan adanya kesesuaian tersebut, maka akan adanya peluang kerja sama yang berkesinambungan guna mendukung prioritas pembangunan daerah yang menjadi visi dasar daerah.

2.2 Kesesuaian Karakteristik DIY dan Gyeongsangbuk-do

Kerja sama *sister province* yang dijalin antara pemerintah daerah DIY dan Gyeongsangbuk-do terjadi karena adanya beberapa faktor yang mendukung. Faktor tersebut yaitu adanya kesesuaian karakteristik dalam budaya dan sejarah. Selain itu, juga terdapat kesesuaian dalam konteks pembangunan, khususnya pembangunan pedesaan serta pemberdayaan masyarakat.

Provinsi Gyeongsangbuk-do mirip dengan provinsi DIY yang kaya akan budaya. Salah satu kota di Gyeongsangbuk-do yang terkenal akan budaya dan sejarahnya adalah kota Gyeongju yang disebut juga sebagai Jogjanya Gyeongsangbuk-do (YGSI 2026). Kota Gyeongju menyimpan banyak sejarah karena menjadi kediaman penguasa Silla selama lebih dari 1000 tahun sehingga diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia. Beberapa tempat bersejarah dan kental akan budaya antara lain, kuil Golgulsa, Istana Donggung, kompleks makam Daereungwon,

museum nasional, dan lain sebagainya (tourkekorea.net, n.d.). Serupa dengan DIY yang sangat kental akan sejarah dan budaya kerajaan, serta memiliki berbagai tempat bersejarah seperti candi, keraton, makam raja-raja, dan lain sebagainya.

Provinsi Gyeongsangbuk-do terdiri dari 10 *si* (kota) dan juga 13 *gun* (kabupaten) yang dimana tersebar baik di wilayah pegunungan maupun pesisir seluas 19.000 km persegi (GONE2KOREA 2025). Masing-masing dari kota tersebut mempunyai keunggulan yang berbeda mulai dari kota pesisir, kota industri, kota budaya, sampai dengan kota yang unggul dalam sektor pertaniannya. Berdasarkan ragam potensi setiap kota tersebut, menunjukkan bahwa terdapat persamaan antara Gyeongsangbuk-do dan DIY yaitu memiliki lahan pertanian di pedesaan. Lebih lanjut, apabila melihat kembali bahwa sejarah Korea Selatan berawal dari negara yang kurang maju kemudian berkat adanya salah satu inisiasi yaitu gerakan *Saemaul Undong* mendorong Korea Selatan menjadi seperti sekarang.

Sementara itu, pada provinsi DIY juga memiliki tantangan pada pemberdayaan pedesaan yang menjadi fokus pembangunan seperti kabupaten Gunung Kidul, Kulonprogo, dan Bantul. Tantangan dari beberapa kabupaten tersebut terletak pada pemberdayaan masyarakat, pemerataan pembangunan, serta pembangunan infrastruktur desa. Sehingga peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengembangkan pembangunan desa yang berkelanjutan merupakan tujuan yang harus dicapai.

Kedua provinsi tersebut sama-sama menempatkan sektor pedesaan sebagai hal penting dalam pembangunan berkelanjutan. Prinsip yang diyakini oleh Korea Selatan adalah membangun suatu negara dimulai dari unit terkecil yaitu desa, sehingga apabila desa sebagai unit terkecil sudah maju maka pasti tersebarluaskan dan negara akan maju (YGSI 2026). Pembangunan pedesaan yang dilakukan oleh Korea Selatan

dalam program *Saemaul Undong* memiliki 3 prinsip utama yaitu, ketekunan, kemandirian, dan kerja sama (YAKKIN 2025). Hal tersebut juga sejalan dengan budaya gotong royong sebagai spirit yang masih hidup pada masyarakat Yogyakarta (BAPPERIDA DIY 2025).

Program *Saemaul Undong* di Korea Selatan berhasil melahirkan pemberdayaan desa dan juga melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlatih. Gyeongsangbuk-do sebagai provinsi asal gerakan tersebut di inisiasi memiliki latar belakang potensinya yang mendukung, yaitu menghasilkan berbagai hasil pertanian seperti kacang-kacangan, beras, kentang, serta produk terkenalnya adalah apel sekitar Daegu (Britannica 2025). Tidak hanya hasil pertanian, tetapi Gyeongsangbuk-do juga menghasilkan produk peternakan, produk laut, hingga perindustrian.

Keberhasilan Korea Selatan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakatnya melalui gerakan *Saemaul Undong* di Gyeongsangbuk-do, menjadi panutan bagi negara berkembang yang memiliki latar belakang serta kondisi masyarakat yang serupa. Provinsi DIY yang mempunyai potensi serupa namun kapasitas masyarakat yang masih kurang berdaya, menjadikan kedua provinsi tersebut cocok untuk melakukan kerja sama. Sehingga dapat dinilai bahwa provinsi DIY membutuhkan penguatan kapasitas masyarakat serta pemberdayaan berkelanjutan pada pedesaan, dan Gyeongsangbuk-do hadir dengan pengalaman penerapan *Saemaul Undong* yang sukses memberdayakan masyarakat desa.

Tabel 1. Kesesuaian Karakteristik DIY dan Gyeongsangbuk-do

No	Kesesuaian karakteristik	Keterangan
1.	Kota bersejarah dan ragam budaya	Kota Gyeongju sebagai salah satu kota di Gyeongsangbuk-do yang penuh akan sejarah. Kesamaan antara kota Gyeongju dan DIY terdapat pada berbagai bangunan prasejarahanya yaitu kuil,

		istana, makam prasejarah, serta museum.
2.	Potensi daerah	Potensi daerah yang unggul serta sesuai antara DIY dan Gyeongsangbuk-do yaitu terdapat wilayah pesisir, kota industri, kota budaya, serta wilayah pertanian.
3.	Tantangan lokal	Persamaan tantangan dalam pemberdayaan masyarakat desa sebagai fokus pembangunan
4.	Adanya sifat saling melengkapi	Adanya tantangan lokal dalam agenda pembangunan daerah dengan fokus pemberdayaan masyarakat desa yang dihadapi oleh DIY, kemudian dilengkapi oleh pengalaman yang dimiliki oleh Gyeongsangbuk-do. Pengalaman tersebut tertuang dalam program <i>Saemaul Undong</i> .

2.3 Arah Kerja Sama dalam Kerangka Visi Misi Daerah 2022-2025

Kebijakan otonomi daerah yang berkembang pesat secara bersamaan yaitu di Indonesia dan Korea Selatan pada masa reformasi tahun 1998 membentuk kebijakan paradiplomasi guna mempromosikan perdagangan, budaya, dan pendidikan kepada negara lain (Mukti et al. 2021). Salah satu pemerintah daerah di Indonesia yang turut memanfaatkan ruang paradiplomasi adalah pemerintah daerah DIY dalam rangka mendukung agenda pembangunan daerah. Kegiatan paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah DIY tidak lepas dari strategi serta pertimbangan tertentu seperti kesesuaian karakteristik antar daerah serta berada dalam kerangka kebijakan pembangunan daerah.

Melihat kembali visi daerah 2022-2025 yaitu, “Terwujudnya PANCAMULIA masyarakat Jogja melalui reformasi kalurahan, pemberdayaan kawasan selatan, serta pengembangan budaya inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi.” menunjukkan bahwa terdapat keselarasan dengan program *Saemaul Undong* yang tengah

dijalankan. Kata-kata yang ada pada visi DIY 2022-2025 yaitu “pemberdayaan kawasan selatan” dimana sesuai dengan fokus program *Saemaul Undong* yakni pemberdayaan desa. Lebih lanjut, berdasarkan visi misi RPJMD 2022-2025, tidak ada perubahan fokus program *Saemaul Undong* yang dijalankan karena sudah sesuai (DPMPTSP DIY 2026). Namun, yang membedakan adalah visi misi menjadi *guideline* dalam menentukan lokasi dimana program akan dijalankan.

Lokasi dijalanannya program *Saemaul Undong* kemudian lebih difokuskan pada kawasan selatan yakni Gunung Kidul, Kulonprogo, dan Bantul. Salah satu bukti nyata yang telah dijalankan adalah adanya pelatihan *Information Technology* (IT) di Nanggulan, Kulonprogo pada perangkat desa sebagai bentuk pengembangan digital. Hal ini menunjukkan bahwa program yang dilaksanakan telah mendukung visi misi gubernur dalam reformasi kalurahan yaitu pada *public service*. Apabila perangkat desa sudah melek IT, maka pelayanan masyarakat akan lebih mudah.

Tidak hanya berdasarkan RPJMD tetapi fokus program ini juga diarahkan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Hal ini seperti yang ditekankan oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud bahwa RPJMD sebagai komitmen politik kepala daerah harus mengacu pada RPJMN yang dimana terdapat Asta Cita sebagai misi Presiden Prabowo Subianto (Ditjen Bina Pembangunan Daerah KEMENDAGRI 2025). Dalam program Asta Cita tersebut, salah satunya adalah adanya ketahanan pangan (Kementerian PPN/Bappenas 2025). Sehingga fokus dari program *Saemaul undong* di DIY juga diarahkan kepada sektor pertanian (DPMPTSP DIY 2026).

Oleh karena itu, kerja sama *sister province* antara DIY dan Gyeongsangbuk-do bukan hanya dipandang sebagai kegiatan diplomatik, namun juga diarahkan untuk

mendapat dampak konkret terhadap indikator pembangunan daerah yang ingin dicapai. Meskipun sejak sebelum periode visi misi DIY 2022-2025 sudah terjalin kerja sama ini, tetapi kemudian programnya diarahkan sesuai dengan visi misi daerah. Arah kerja sama tersebut menunjukkan bahwa adanya aktivitas paradiplomasi dengan kerangka kebijakan pembangunan daerah yang terintegrasi.

Berdasarkan pembahasan pada Bab II, kerja sama *sister province* antara DIY dan Gyeongsangbuk-do dilatarbelakangi oleh adanya kesesuaian karakteristik pembangunan serta relevansinya dengan visi misi daerah DIY 2022-2025. Adanya kesesuaian menjadikan kerja sama tersebut memiliki nilai strategis bagi pembangunan daerah. Apabila suatu kerja sama dipandang strategis serta mendukung agenda pembangunan, maka pemerintah daerah perlu memastikan keberlanjutan hubungan tersebut melalui mekanisme institusionalisasi atau pelebagaan yang jelas. Sehingga Bab III hadir untuk membahas bagaimana kerja sama tersebut diinstitusionalisasikan berdasarkan teori paradiplomasi Alexander S. Kuznetsov.

BAB 3

INSTITUSIONALISASI PARADIPLOMASI DALAM KERJA SAMA *SISTER* PROVINCE DIY DAN GYEONGSANGBUK-DO

Melalui teori paradiplomasi yang telah dijelaskan oleh Kuznetsov (2015), paradiplomasi merupakan aktivitas hubungan luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah subnasional. Berdasarkan hal tersebut, terdapat enam upaya institusionalisasi kerja sama paradiplomasi yang perlu dilakukan oleh daerah yang melakukan kerja sama. Pada bab ini, penulis akan membahas terkait proses institusionalisasi atau proses pelembagaan kerja sama paradiplomasi antara DIY dan Gyeongsangbuk-do serta menelaah proses institusionalisasi mana yang sudah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan.

3.1 Upaya Institusionalisasi yang Telah Terlaksana

3.1.1 Departemen Khusus Pengelola Kerja Sama Internasional

Pembentukan badan atau unit khusus dalam struktur pemerintahan daerah yang mengelola kerja sama internasional merupakan salah satu indikator institusionalisasi paradiplomasi menurut Kuznetsov. Badan khusus tersebut mempunyai fungsi yaitu sebagai fasilitator dalam pelaksanaan kerja sama internasional. Menurut Kuznetsov, kekuasaan atau tugas umum badan khusus tersebut salah satunya adalah koordinator seluruh kebijakan, program, serta kegiatan antar mitra kerja sama termasuk juga pemeliharaan kerja sama (Kuznetsov 2015). Berdasarkan hal tersebut, penyerahan wewenang terkait pengelolaan kerja sama internasional di daerah DIY yaitu kepada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DIY bagian Kerja Sama Luar Negeri (KSLN).

Pembentukan badan khusus yang mengelola kerja sama internasional di DIY sebenarnya sudah berganti beberapa kali mulai dari tahun 2000 yaitu oleh BAPPEDA, 2004 oleh Biro Kerja Sama, selanjutnya berganti menjadi BKPM, setelah itu menjadi DPPM, dan pada akhirnya pada tahun 2019 menjadi DPMPTSP (DPMPTSP DIY 2026). Kuznetsov juga menyebutkan bahwa sumber daya yang tergabung dalam badan khusus pengelola kerja sama internasional harus memiliki latar belakang yang paham akan politik internasional (Kuznetsov 2015). Hal ini dapat disesuaikan dengan riwayat kepala kantor yang menjabat pada badan khusus pengelola kerja sama luar negeri, sejak tahun 2004 kepala kantor berasal dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (DPMPTSP DIY 2026).

Fungsi dari DPMPTSP yaitu sebagai fasilitator atau inisiator yang membuka komunikasi serta menjadi pihak penghubung dengan OPD teknis dalam berbagai program kerja sama. Salah satu contohnya pada kerja sama *sister province* DIY dan Gyeongsangbuk-do yang banyak melakukan kerja sama dalam program pemberdayaan masyarakat, DPMPTSP DIY melakukan *channeling* dengan biro pemberdayaan masyarakat dilanjut dengan *monitoring* serta evaluasi. Selain sebagai fasilitator dengan dinas terkait atau kalurahan terkait, DPMPTSP DIY juga menjadi fasilitator dengan kementerian ketika dalam proses pembuatan *LoI* atau *MoU*. Lingkup koordinasi yang dilakukan tidak terbatas pada lingkup provinsi DIY saja, tetapi juga dengan kementerian terkait. Hal ini mencerminkan bahwa kerja sama internasional tersebut tidak hanya bersifat simbolik, namun dikelola melalui mekanisme yang terorganisir.

Peran DPMPTSP dalam hal ini dinilai sangat penting karena segala atribut yang berkaitan dengan kerja sama luar negeri menjadi tugas dari DPMPTSP (DPMPTSP DIY 2026). Termasuk dalam menerima kunjungan tamu dari luar negeri. Segala kegiatan yang berhubungan dengan luar negeri, terdapat peran dari DPMPTSP. Dalam hal *sister city* antara DIY dan Gyeongsangbuk-do terdapat beberapa kunjungan dari pihak Gyeongsangbuk-do yang pada setiap kunjungan tersebut turut dihadiri oleh perwakilan DPMPTSP. Lebih jelasnya beberapa kegiatan yang dilakukan selama tahun 2022-2025 sesuai dengan cakupan penelitian, dapat dilihat pada bagian subbab 3.1.2.

Tidak hanya itu, DPMPTSP pada *sister province* dalam program *Saemaul Undong* ini turut melakukan koordinasi dan komunikasi dengan YGSI sebagai perpanjangan tangan provinsi Gyeongsangbuk-do. Monitoring selama berjalannya program kerja sama juga turut dilaporkan rutin setiap tahunnya oleh DPMPTSP kepada pemerintah pusat termasuk Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul sebagai pemerintah pusat yang berhubungan dengan Korea Selatan (DPMPTSP DIY 2026). Adapun *event* yang turut didirikan oleh pemerintah daerah DIY dengan melibatkan peran aktif DPMPTSP mengenai hubungan kerja sama DIY dan Gyeongsangbuk-do. *Event* tersebut adalah *Friends of Yogyakarta (FoY)* tahun 2024 dan *Korean Day* pada tahun 2025 (DPMPTSP DIY 2026). Kedua *event* tersebut akan dibahas lebih lanjut pada bagian 3.1.3 *Partisipasi dalam Kegiatan Internasional oleh Mitra Kerja Sama*.

3.1.2 Kunjungan Resmi Lintas Negara oleh Pemerintah Daerah

Kuznetsov mengatakan bahwa seringkali kunjungan resmi otoritas regional ke luar negeri menjadi hal yang penting dalam hubungan kerja sama internasional (Kuznetsov 2015). Selain itu tingkat kompetensi yang menjadi perwakilan kunjungan serta tingkat mitra tuan rumah asing juga penting. Kunjungan ini dapat dikatakan sebagai aktivitas formal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam hal kerja sama internasional.

Hubungan *sister province* yang sudah sejak lama dijalin oleh DIY dan Gyeongsangbuk-do, tentunya sering adanya kunjungan antar pemerintah daerah guna membahas mengenai kerja sama tersebut. Kunjungan yang dilakukan pada awal hubungan sebelum adanya *MoU* antara DIY dan Gyeongsangbuk-do yaitu adalah peninjauan guna membuktikan profil masing-masing daerah, baik dari DIY ke Gyeongsangbuk-do maupun sebaliknya (DPMPTSP DIY 2026). Semakin berlanjutnya hubungan kerja sama ini, tidak hanya terdapat kunjungan oleh pemerintah daerah, tetapi pihak Gyeongsangbuk-do juga melakukan kunjungan oleh petani lokal untuk membantu proses dalam berjalannya program *Saemaul Undong*.

Tabel 1. Daftar Kunjungan Oleh Perwakilan Gyeongsangbuk-do ke Provinsi DIY Tahun 2022-2025

No	Kunjungan	Tahun	Kepentingan
1.	Perwakilan Gyeongsangbuk-do, Sekretaris Jenderal <i>Saemaul Foundation</i>	30 Juni 2022	- Audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. - Peresmian <i>Saemaul</i> Jamur Center Bleberan.
2.	Delegasi kepala kantor <i>Saemaul Foundation</i>	1 Juli 2022	- Rencana aksi kerja hingga 2025.

3.	Presiden Direktur <i>Saemaul</i>	22 November 2022	- Audiensi dengan Gubernur DIY.
4.	DPRD Gyeongsangbuk-do	27 Desember 2022	- <i>Monitoring</i> perkembangan program di Bleberan.
5.	Divisi <i>Saemaul</i> Pemerintah Provinsi Gyeongsangbuk-do	27-29 Mei 2024	- Kunjungan ke lokasi program <i>Saemaul</i> . - Audiensi mengenai kerja sama yang terjalin antar kedua daerah, di kantor DPMPTSP.
6.	Kedutaan Besar Republik Korea di Indonesia	14-15 November 2024	- Kunjungan lapangan ke Nanggulan untuk meninjau perkembangan program.
7.	Wakil Gubernur Gyeongsangbuk-do	3-4 Mei 2025	- Kunjungan ke Nanggulan sebagai daerah dilaksanakan program, - Penandatanganan Reafirmasi kerja sama di kantor Gubernur DIY, - Menghadiri acara <i>Korean Day</i> , sebagai peringatan 20 tahun kerja sama.
8.	Sekretaris Jenderal <i>Saemaul</i> <i>Foundation</i>	5 Mei 2025	- Kunjungan ke daerah tempat dilaksanakannya program.

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dilihat bahwa adanya kunjungan resmi dari pemerintah Gyeongsangbuk-do dalam kurun waktu 2022-2025 sesuai dengan cakupan penelitian. Salah satu kunjungan dalam 5 tahun terakhir yaitu pada tanggal 1 Juli 2022. Kunjungan tersebut dilakukan oleh delegasi dari kepala kantor perwakilan Gyeongsangbuk-do, Saemaul Foundation, serta pemerintah daerah DIY guna membahas rencana aksi kerja

sama kedua daerah hingga tahun 2025 (DPMPTSP DIY 2026). Lima bulan setelah pertemuan tersebut, pada tanggal 27 Desember 2022 juga dilaksanakan pertemuan antara delegasi DPRD provinsi Gyeongsangbuk-do yang kemudian diterima oleh Gubernur DIY serta ketua DPRD DIY dalam hal kunjungan kerja.

Selain kunjungan formal dalam proses terlaksananya kerja sama antara DIY dan Gyeongsangbuk-do seperti ketika penandatanganan *MoU* atau agenda *Reaffirmation MoU*, pemerintah daerah Gyeongsangbuk-do juga melakukan kunjungan resmi lain. Kunjungan resmi tersebut dilakukan oleh wakil gubernur Gyeongsangbuk-do pada saat perayaan 20 tahun kerja sama DIY Gyeongsangbuk-do di Yogyakarta (DPMPTSP DIY, 2026). Acara tersebut bernama *Korean Day* yang dilaksanakan di kompleks Kepatihan, Yogyakarta guna mendukung hubungan yang lebih erat antar kedua daerah.

Kunjungan yang sering dilakukan dalam hubungan kerja sama *sister province* seperti yang dilakukan oleh DIY dan Gyeongsangbuk-do, menunjukkan hasil tindak lanjut program yang konkret. Sehingga kerja sama tersebut selain dapat dikatakan sebagai kerja sama yang aktif tetapi juga menunjukkan tingkat institusionalisasi yang lebih kuat.

3.1.3 Partisipasi dalam Kegiatan Internasional oleh Mitra Kerja Sama

Berdasarkan perspektif Kuznetsov pada teori paradiplomasi, partisipasi atau penyelenggaraan forum internasional termasuk dalam kategori institusionalisasi poin ke 4. Menurut Kuznetsov bentuk institusionalisasi yang termasuk dalam partisipasi pemerintah daerah tersebut dapat dilihat melalui keterlibatan dalam forum ataupun pameran yang dimana juga penting dalam

melihat seberapa seringnya kegiatan tersebut dilaksanakan (Kuznetsov 2015, p 112). Kegiatan tersebut bukan hanya sebagai ajang promosi, namun juga menjadi sarana dalam memperkuat hubungan diplomatik antar mitra kerja sama luar negeri.

Pada hubungan kerja sama luar negeri yang dilaksanakan oleh DIY sendiri, terdapat forum internasional yang dimana juga dihadiri oleh beberapa mitra kerja samanya. Forum tersebut bernama *Friends of Yogyakarta (FoY)*. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh DIY dengan mengundang mitra kerja samanya guna memperkenalkan berbagai budaya, potensi, dan juga karakteristik khas dari DIY. Isi dari acaranya antara lain pelatihan bahasa Indonesia, pengenalan budaya, desa wisata, serta UMKM sebagai keistimewaan Yogyakarta secara lebih dekat (DPMPTSP DIY, 2026).

Salah satu isi kegiatan yang berhasil memikat para peserta forum *FoY* adalah belajar membatik tulis yang dilakukan di kampung batik Giriloyo, Wukirsari, Imogiri, Bantul pada tanggal 8 bulan Agustus 2024 (Humas Pemda DIY 2024). Lebih lanjut, dijelaskan bahwa batik merupakan salah satu bagian dari budaya yang diharapkan akan menjadi gerbang awal bagi DIY dan juga para mitra kerja sama luar negeri untuk mengembangkan maupun membuka potensi kerja sama di bidang lainnya. Koordinator bidang kerja sama luar negeri DIY, Fathi Mustaqim menyebutkan bahwa program ini bertujuan untuk menciptakan diplomasi budaya dengan mitra kerja sama, dan juga mempromosikan potensi DIY dalam bidang budaya, pariwisata, ekonomi kreatif, pendidikan, serta industri kepada mitra internasional (Universitas Amikom Yogyakarta 2024).

Acara *FoY* pertama kali dilaksanakan pada tahun 2024 dan akan dilaksanakan secara rutin setiap 2 tahun sekali. *FoY* merupakan bentuk ucapan terimakasih oleh Pemda DIY kepada para mitra kerja sama luar negeri, salah satunya yaitu kepada Gyeongsangbuk-do sebagai salah satu mitra kerja sama yang aktif. Peserta dari *FoY notabene* terdiri dari 6 negara, tetapi juga dihadiri oleh negara-negara lain disekitar yang mempunyai potensi untuk melakukan kerja sama dengan DIY (DPMPTSP DIY, 2026)).

Sebaliknya, DIY juga pernah menghadiri kegiatan Internasional yang diadakan oleh mitra kerja sama luar negeri yaitu oleh Gyeongsangbuk-do. Kegiatan tersebut yaitu adalah pelatihan bahasa Korea untuk para mitra kerja sama Gyeongsangbuk-do, salah satunya DIY. Pihak DIY mengirim 6 orang perwakilan untuk turut serta dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Lebih lanjut, pelatihan bahasa Korea tersebut dilakukan selama 2 minggu di Gyeongsangbuk-do (DPMPTSP DIY, 2026). Selain kegiatan tersebut, sebetulnya juga terdapat beberapa acara lain yang diadakan oleh Gyeongsangbuk-do. Namun karena sempit adanya efisiensi anggaran, maka kegiatan internasional dikurangi.

Forum *FoY* di DIY dan kegiatan pelatihan bahasa Korea di Gyeongsangbuk-do menunjukkan bahwa kedua provinsi tidak hanya menjalin kerja sama dalam bentuk dokumen resmi seperti *MoU*, namun juga semakin meningkatkan hubungan melalui forum interaksi nyata. Partisipasi dengan adanya kehadiran delegasi mitra kerja sama luar negeri dalam kegiatan tersebut dapat dilihat bahwa terdapat komunikasi dua arah serta keberlanjutan hubungan kerja sama yang dijalin antar provinsi. Berdasarkan hal tersebut,

hubungan kerja sama luar negeri antara DIY dan Gyeongsangbuk-do dikatakan bahwa institusionalisasi paradiplomasi poin ke 4 telah terlaksana.

3.1.4 Partisipasi dalam Forum Kerja Sama Regional Multilateral

Bergabungnya suatu daerah dalam jaringan regional multilateral menjadi suatu titik akses sebagai alat berkolaborasi dengan mitra kerja sama luar negeri. Oleh karena itu, menurut Kuznetsov keterlibatan pemerintah daerah dalam jaringan global menjadi salah satu indikator penting dalam institusionalisasi paradiplomasi. Keanggotaan dalam forum kerja sama regional multilateral ini membahas mengenai masalah-masalah khusus seperti pertanian, pembangunan berkelanjutan, energi, transportasi, dan lain sebagainya (Kuznetsov 2015, p 112).

Dalam konteks ini, keanggotaan Pemda DIY dalam *The East Asia Local and Regional Government Congress* (EALRGC) atau juga disebut dengan Kongres Nara, menjadi indikator konkret institusionalisasi paradiplomasi poin ke 5 menurut Kuznetsov. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan DPMPTSP DIY, disimpulkan bahwa Kongres Nara merupakan pertemuan tahunan tingkat daerah lintas batas negara untuk *sharing best practice* pengelolaan *public service* di wilayah masing-masing anggota (DPMPTSP DIY, 2026). Lokasi yang dijadikan sebagai tempat pertemuan tersebut berganti-ganti berdasarkan negara anggota. Terakhir kali DIY menghadiri forum tersebut yaitu pada tahun 2022, tepatnya di Bandung.

DIY tercatat sebagai salah satu anggota dari Indonesia selain Jawa Barat. Anggota lain yang berasal dari luar negeri dalam forum ini antara lain pemerintah daerah dari Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Vietnam, Filipina,

dan Malaysia. Gyeongsangbuk-do sebagai salah satu provinsi di Korea Selatan ternyata juga merupakan salah satu anggota Kongres Nara. Sehingga menunjukkan bahwa hubungan antara DIY dan Gyeongsangbuk-do tidak hanya secara bilateral sebagai *sister province*, tetapi juga berada dalam kerangka jaringan regional multilateral.

Kongres Nara didirikan pada tahun 2010 sebagai kongres pemerintah lokal dan regional Asia Timur guna memperingati 1.300 tahun ibu kota Nara Heijo-kyo (NARA pref, n.d.). Lebih lanjut, tujuan dari kongres tersebut untuk memperkuat kerja sama antar pemerintah regional di Asia Timur melalui pertemuan rutin, pertukaran pengalaman, serta adanya pembahasan berbagai isu pembangunan daerah. Kongres Nara didirikan guna menyediakan ruang diskusi terstruktur dan berkelanjutan bagi pemerintah regional dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah yang kian berkembang. Oleh karena itu dapat dinilai bahwa keanggotaan DIY bukan hanya sekedar kehadiran simbolik, namun merupakan bentuk keterlibatan aktif dalam mekanisme diplomasi subnasional terstruktur, memiliki keanggotaan tetap, serta adanya agenda kongres berkala.

Berkaitan dengan konsep institusionalisasi paradiplomasi oleh Kuznetsov, menunjukkan bahwa keanggotaan DIY dalam forum tersebut menunjukkan bukti bahwa paradiplomasi yang dijalankan telah berkembang dan berorientasi jangka panjang. Terlebih karena Gyeongsangbuk-do juga tergabung dalam forum yang sama, maka hubungan antara DIY dan Gyeongsangbuk-do menjadi lebih kuat melalui pertemuan serta interaksi saling bertukar pengalaman. Pertukaran pengalaman tersebut juga memungkinkan akan terciptanya kerja sama dalam berbagai bidang. Sehingga

pemerintah daerah dari kedua provinsi tersebut dapat meningkatkan hubungan persahabatan.

3.2 Upaya Institusionalisasi yang Belum Terlaksana

3.2.1 Pendirian Kantor Perwakilan Daerah di Luar Negeri

Kantor perwakilan yang dibuka oleh pemerintah daerah di luar negeri juga disebut “parakonsulat” yang dimana akan memberikan dukungan serta konsultasi untuk masyarakat regional dalam menyukseskan hubungan kerja sama luar negeri pada berbagai bidang (Kuznetsov 2015, p 112). Pendirian kantor perwakilan ini penting untuk memudahkan komunikasi antar kedua pihak yang melakukan kerja sama. Keberadaan kantor perwakilan ini juga menunjukkan bahwa tingkat institusionalisasi paradiplomasi tinggi karena kegiatan hubungan luar negeri dijalankan melalui struktur permanen dan berkelanjutan.

Namun, pada wawancara yang telah dilakukan dengan DPMPTSP DIY menunjukkan bahwa pemerintah daerah DIY tidak mempunyai kantor perwakilan permanen di luar negeri. Hal tersebut karena adanya peraturan sistem pemerintahan di Indonesia yang tidak mengizinkan pendirian kantor perwakilan daerah di luar negeri dalam melaksanakan hubungan kerja sama luar negeri. Peraturan tersebut terdapat dalam pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020. Pada pasal tersebut terdapat 5 poin antara lain: a) Mempunyai hubungan diplomatik, b) Merupakan urusan pemerintah daerah, c) Tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri, d) Tidak mencampuri urusan pemerintahan dalam negeri, dan e) Sesuai RPJMN serta RPJMD (BPK RI 2020).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berlaku tersebut, disebutkan pada poin ke 3 bahwa tidak diperbolehkan membuka kantor perwakilan di luar negeri. Namun dengan tidak adanya kantor perwakilan pemerintah daerah DIY di Gyeongsangbuk-do tidak menghambat komunikasi dan koordinasi antar keduanya. Hal tersebut karena adanya kantor yayasan Gyeongsangbuk-do di Yogyakarta, bernama Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesia (YGSI). YGSI merupakan perpanjangan tangan dari Saemaul pusat yang ada Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan, dimana keberadaan YGSI ini menjadi salah satu faktor kesuksesan program *Saemaul Undong* di DIY (DPMPTSP DIY, 2026).

Keberadaan kantor YGSI di DIY menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan program *Saemaul Undong* karena selain turun langsung ke lokasi untuk mengawal program, tetapi mereka juga melakukan koordinasi dengan pemerintah desa serta kelompok tani (DPMPTSP DIY, 2026). Sehingga pihak Gyeongsangbuk-do turut melakukan monitoring langsung untuk pendampingan dan menurunkan relawan asal Korea Selatan guna menyukseskan atau memastikan kesuksesan program. Lebih lanjut dengan adanya kantor perwakilan YGSI tersebut, menunjukkan bahwa sifat program yang dilakukan dalam kerja sama *sister province* antara DIY dan Gyeongsangbuk-do yaitu jangka panjang.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa ketiadaan kantor perwakilan daerah DIY di Gyeongsangbuk-do tidak mempengaruhi komunikasi dalam berkoordinasi dalam menjalankan program kerja sama. Meskipun DIY tidak mendirikan kantor perwakilan di luar negeri, namun Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Seoul yang ada di Korea Selatan

selalu *memonitoring* kerja sama yang dijalin antara DIY dan Gyeongsangbuk-do (DPMPTSP DIY, 2026). Selain itu, Pemda DIY juga harus melaporkan terkait kerja sama yang dijalin dengan mitra luar negeri kepada Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) setiap tahunnya.

3.2.2 *Delegasi Pemerintah Daerah dalam Agenda Internasional*

Maksud dari delegasi pemerintah daerah dalam agenda internasional yaitu adalah pemerintah daerah mendapat utusan resmi dari pemerintah pusat untuk menghadiri agenda yang diselenggarakan oleh mitra kerja sama luar negeri (Kuznetsov 2015, p 112). Adanya utusan resmi dari pemerintah pusat tersebut memungkinkan menjadi langkah untuk meningkatkan hubungan antar provinsi yang melakukan kerja sama luar negeri serta memperluas kerja sama dalam beberapa bidang tertentu.

Melihat indikator institusionalisasi paradiplomasi tersebut, menunjukkan bahwa DIY belum pernah menjadi delegasi resmi pemerintah pusat untuk menghadiri agenda internasional yang diadakan oleh Gyeongsangbuk-do selaku mitra kerja sama (DPMPTSP DIY 2026). Meskipun pemerintah daerah DIY belum pernah menjadi delegasi resmi dari pemerintah pusat, namun pemerintah daerah DIY beberapa kali telah melakukan kunjungan resmi daerah ke Gyeongsangbuk-do seperti yang dijelaskan pada subbab 3.1.2. Seluruh kunjungan yang akan dilaksanakan meskipun bukan merupakan utusan atau delegasi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah wajib untuk meminta izin kepada pemerintah pusat seperti Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), Kementerian Luar Negeri

(KEMLU), serta Kementerian Sekretariat Negara (KEMENSETNEG) (DPMPTSP DIY, 2026).

BAB 4

PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas mengenai institusionalisasi paradiplomasi DIY dan Gyeongsangbuk-do dalam program *Saemaul Undong* berdasarkan kerangka visi misi daerah 2022-2025. Kesimpulan berisi rangkuman dari seluruh bab-bab yang telah penulis bahas sebelumnya. Sedangkan, rekomendasi ditujukan kepada pemerintah daerah DIY dan kepada peneliti selanjutnya guna melengkapi kekurangan dalam penelitian ini.

4.1 Kesimpulan

Kerja sama *sister province* antara DIY dan Gyeongsangbuk-do terjalin karena adanya kesesuaian karakteristik serta juga berlandaskan hukum sesuai dengan visi misi daerah 2022-2025. Pada kerja sama ini, telah terlaksana 4 indikator institusionalisasi antara lain:

- 1.) Pembentukan departemen khusus pengelola kerja sama internasional, yaitu oleh DPMPTSP DIY berfungsi sebagai fasilitator dan koordinator dalam berjalannya kerja sama. Sumber daya yang tergabung di dalamnya juga mempunyai wawasan politik internasional yang baik.
- 2.) Kunjungan resmi ke negara mitra kerja sama, yang dimana kedua provinsi saling melakukan kunjungan mulai dari peninjauan hingga kunjungan kerja oleh Wakil Gubernur maupun dari *Saemaul Foundation* guna *monitoring* program yang sedang berjalan.
- 3.) Partisipasi dalam kegiatan internasional mitra kerja sama, dimana terdapat 2 forum yaitu *FoY* agenda DIY dan pelatihan bahasa Korea

oleh Gyeongsangbuk-do. Kedua forum tersebut sama-sama mengundang satu sama lain sebagai mitra kerja sama dan berisi pengenalan lebih dalam mengenai potensi daerah yang dimiliki.

- 4.) Partisipasi dalam forum kerja sama regional multilateral. Kedua provinsi tersebut tergabung dalam satu forum kerja sama regional multilateral bernama Kongres Nara. Berguna untuk bertukar pengalaman oleh setiap daerah yang menjadi anggota.

Pada kerja sama ini juga terdapat 2 indikator institusionalisasi yang belum terlaksana, yaitu:

- 1.) DIY tidak mendirikan kantor perwakilan daerah di luar negeri karena sesuai peraturan negara. Namun, kegiatan koordinasi dan komunikasi dengan Gyeongsangbuk-do tidak terhambat karena adanya kantor YGSI sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah Gyeongsangbuk-do.
- 2.) Serta pemerintah daerah DIY belum pernah menjadi delegasi resmi pemerintah pusat dalam agenda internasional. Namun, kunjungan sudah beberapa kali dilakukan oleh DIY serta tetap berada dibawah perizinan kementerian di Indonesia yang berhubungan dengan kegiatan *sister province*.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, peneliti merekomendasikan dua hal, diantaranya:

- 1) Rekomendasi untuk pemerintah daerah, pada konteks institusionalisasi bagian indikator partisipasi dalam jaringan dan forum internasional. Pemerintah

Daerah dapat mengoptimalkan keterlibatannya dalam jaringan seperti The East Asia Local and Regional Government Congress (EALRGC) untuk dimanfaatkan lebih strategis guna memperluas peluang kerja sama di bidang lainnya yang tentunya relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah DIY. Hal tersebut karena diketahui kehadiran DIY terakhir pada tahun 2022.

- 2) Adanya kekurangan dalam penelitian ini, mendorong peneliti untuk merumuskan rekomendasi untuk peneliti selanjutnya. Fokus dari penelitian ini yaitu pada analisis institusionalisasi paradiplomasi serta keterkaitannya dengan visi misi daerah. Guna memperluas kajian dalam penelitian, selanjutnya penelitian dapat diukur secara kuantitatif dampak program *Saemaul Undong* terhadap indikator pembangunan desa di DIY sebagai fokus pelaksanaan. Indikator tersebut yaitu seperti penurunan angka kemiskinan atau peningkatan pendapatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Choi, Young-Chool, and Younghwa Kee. 2024. "Pro-Metrics." *The nature of Saemaul Undong as a rural development strategy: Topic modelling and text mining analysis* 4 (1). <https://ijsmc.pro-metrics.org/index.php/i/article/view/90?utm>.
- Deniar, Shannaz M., and Juwita Maharani. 2022. "JURNAL PARTISIPATORIS." *The Utilization of Spirit of Saemaul Undong through Village Renewal Program in DI Yogyakarta* 4 (2). <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalpartisipatoris/article/view/27776>.
- Dewi, Sannya P. 2020. "Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik." *ANALISIS IMPLEMENTASI KERJASAMA SISTER-PROVINCE ANTARA PROVINSI YOGYAKARTA DENGAN GYEONGSANGBUK-DO DALAM PENGEMBANGAN DESA* 2 (1): 42-54. <https://riset.unisma.ac.id/index.php/JISoP/article/view/5033/5362>.
- Hakiem, Fadlan N., and Novi R. Amalia. 2021. "Dauliyah : Journal of Islam and International Affairs." *DAMPAK KERJASAMA LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENINGKATAN KEAMANAN EKONOMI (Studi Kasus: Implementasi Program Saemaul Undong di Provinsi Yogyakarta)* 6 (1): 59-86. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/dauliyah/article/view/5584>.
- Hasymi, Aditya M., Gardyas B. Adninda, Megan A. Putri, and Diva S. Ariani. 2024. "Jurnal Dinamika Global." *ANALISIS IMPLIKASI KERJASAMA SISTER CITY YOGYAKARTA DAN GYEONGSANGBUK-DO DALAM PEMBENTUKAN KOTA TANGGUH MELALUI PROGRAM SAEMAUL UNDONG* 9 (2). <http://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dinamika-global/article/view/3069>.
- Issundari, Sri. 2024. "SINERGI: Journal of Strategic Studies & International Affairs." *DECENTRALISED INTERNATIONAL COOPERATION: INSIGHTS FROM THE YOGYAKARTA (INDONESIA) - GYEONGSANGBUKDO (SOUTH KOREA) PARTNERSHIP* 4 (1). <https://spaj.ukm.my/sinerji/index.php/sei/article/view/84/131>.
- Mukti, Takdir A. 2015. "The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin." *Paradiplomacy: Bangkitnya Aktor Lokal di Fora Internasional Paradiplomacy: The Rise of Local Actor in International Fora* 1, no. 1 (Januari): 85-86. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://media.neliti.com/media/publications/102549-ID-paradiplomacy-bangkitnya-aktor-lokal-di.pdf&ved=2ahUKEwj1k5GBsruSAXVkxDgGHSOuExEQFnoECBoQAQ&usq=AOvVaw2H67kb0pv_bcMiZkImREV6.
- Mukti, Takdir A., Laode M. Fathun, Ali Muhammad, Stivani I. Sinambela, and Sugeng Riyanto. 2021. "JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL." *Paradiplomacy Policies and Regional Autonomy in Indonesia and Korea* 9, no. 2 (Maret): 140. https://pdfs.semanticscholar.org/43ee/f05e16cd33152d18b2dce2c45ee3c86a9728.pdf?gl=1*1rtdam1*_gcl_au*NDc2MTkyNDE0LjE3NzAwMDM5MDA.*_ga*NDUyNDc5MjU3LjE3NzAwMDM5MDA.*_ga_H7P4ZT52H5*czE3NzAwMDM5MDAkzEkZzEkdDE3NzAwMDM5NDIkajE4JGwwJGgw.
- Nyong, Arsil, and Alwadud Lule. 2025. "Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan." *Pengaruh Penerapan Undang-Undang Otonomi Daerah Terhadap Pelaksanaan Hubungan Internasional Di Yogyakarta* 11 (7. D). <http://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12467>.
- Syuryansyah, Muhammad I. Yunazwardi, and Arina Nihayati. 2025. "Journal of Islamic World and Politics." *A Systematic Literature Review on Indonesian Paradiplomacy (2018-2024)* 9, no. 02 (Desember): 156.

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jiwp.umy.ac.id/index.php/jiwp/article/view/188&ved=2ahUKEwiF9uaa37iSAxXh1TgGHaiiM-cQFnoECBoQAQ&usg=AOvVaw2QaJM8vZ05H5zfFtCkPZ9z>.

Artikel Daring

- Bintang, Ihsan. 2023. "Sister City Indonesia dan Korea Selatan." Saung Korea. <https://saungkorea.com/sister-city-indonesia-dan-korea-selatan/>.
- Alvarez, Mariano. 2020. "The Rise of Paradiplomacy in International Relations." <https://www.e-ir.info/2020/03/17/the-rise-of-paradiplomacy-in-international-relations>.
- Universitas Amikom Yogyakarta. 2024. "Friends of Yogyakarta 2024 | Universitas Amikom Yogyakarta." *Universitas Amikom Yogyakarta Sambut Delegasi Internasional dalam Program – Friends of Yogyakarta 2024*, Agustus 7, 2024. <https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://home.amikom.ac.id/2024/08/07/universitas-amikom-yogyakarta-sambut-delegasi-internasional-dalam-program-friends-of-yogyakarta-2024/%23::~:~:text=%3DProgram%2520ini%2520bertujuan%2520untuk%2520mencipta>.

Buku

- Kuznetsov, Alexander S. 2015. *Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs*. N.p.: London and Newyork: Routledge: Taylor & Francis Group.
- Mukti, Takdir A. 2013. *PARADIPLOMACY KERJASAMA LUAR NEGERI OLEH PEMDA DI INDONESIA*. N.p.: The Phinisi Press Yogyakarta. https://www.academia.edu/79412812/Paradiplomacy_Kerjasama_Luar_Negeri_oleh_Pemda_di_Indonesia.
- Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. 2022. *INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL 2022*.
- Sari, Roza Y., Murtianingsih, Novia E. Tama, Ika S. Sulistyaningrum, Fathi Mustaqim, Rizki Mahardiani, and DPMPTSP DIY. n.d. *BUNGA RAMPAI KERJASAMA LUAR NEGERI*. D.I Yogyakarta: n.p.

Situs

- BAPPERIDA DIY. 2025. "RPJMD 2022 - 2027." Bapperida.Jogjaprov. <https://bapperida.jogjaprov.go.id/page/e9ec3bb2-6f94-4a72-8865-5eac1c183f6d>.
- Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. 2024. "Visi dan Misi." <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://birotapem.jogjaprov.go.id/i.php%3Fm%3Dm%26j%3DVisi-dan-Misi%23::~:~:text=%3DMemberdayakan%2520Kawasan%2520Selatan%2520dengan%2520mengoptimalkan,keuntungan%2520kemajuan%2520teknologi%2520>.
- BPK RI. 2020. "Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri." <https://peraturan.bpk.go.id/Details/143323/permendagri-no-25-tahun-2020>.
- BPK RI. 2023. "Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2023." <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://peraturan.bpk.go.id/Details/248691/perda-no-1-tahun-2023&ved=2ahUKEwjB0rr49OqSAxVjT2wGHUEBCJwQFnoECCEQAQ&usg=AOvVaw05gBYx6OpSHj3F2eyf344c>.
- Britannica. 2025. "Gyeongsang Utara." Britannica. <https://www.britannica.com/place/North-Gyeongsang>.
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. 2018. "UNDANG-UNDANG

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.”

https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2018/11/uu_32_2004_pemerintahandaerah.pdf.

Ditjen Bina Pembangunan Daerah KEMENDAGRI. 2025. “Pemerintah Instruksikan Kepala Daerah Baru Segera Susun RPJMD dan Renstra.” https://bangda.kemendagri.go.id/berita/baca_kontent/1525/pemerintah_instruksikan_kepala_daerah_baru_segera_susun_rpjmd_dan_renstra#:~:text=Ia%20juga%20menekankan%20bahwa%20RPJMD,selaras%20dengan%20tujuan%20pembangunan%20nasional.

GONE2KOREA. 2025. “Gyeongbuk-Do South Korea Also known as North Gyeongsang Province.” https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.gone2korea.com/gyeongbuk-province/&ved=2ahUKEwiHodO9IMKQAxWz_skDHZdlEuk4ChAWegQIGhAG&usg=AOvVaw0KoSUzyiA0BMn2gXFMbX-n.

HUMAS DIY. 2025. “Saemaul Undong Dukung Visi-Misi Gubernur DIY.” Portal Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. <https://jogjaprov.go.id/berita/detail-berita/saemaul-undong-dukung-visi-misi-gubernur-diy>.

Humas Pemda DIY. 2024. Facebook. <https://www.facebook.com/humaspemdadiy/posts/pesona-batik-mampu-memikat-para-peserta-program-friends-of-yogyakarta-2024-saat-/804981385139043/>.

Kementerian PPN/Bappenas. 2025. “RPJMN TAHUN 2025-2029.” https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/dokumenbappenas/konten/Dokumen%25202025/Konten/%257BDigital%257D%2520Ringkasan%2520RPJMN%2520Tahun%25202025-2029.pdf&ved=2ah.

NARA pref. n.d. “The East Asia Local and Regional Government Congress.” https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://www3.pref.nara.jp/eastasia_e/%23~:text%3DHome%252D%2520The%2520East%2520Asia%2520Local%2520and%2520Regional%2520Government%2520Congress&ved=2ahUKEwjLj7KvkOCSAxXPMdAFHatwIoEQqYcPegQIBhAC&opi=8997.

tourkekorea.net. n.d. “Gyeongju Korea Selatan, Kota Tua Bersejarah yang Menakjubkan.” <https://tourkekorea.net/gyeongju-korea-selatan/>.

YAKKIN. 2025. “Mengulik Dua Pendekatan Pemberdayaan Desa: Saemaul Undong ala Korea Selatan dan Koperasi Desa Merah Putih di Indonesia.” Yayasan Kemandirian Perkooperasian Indonesia. <https://yakkin.or.id/2025/06/mengulik-dua-pendekatan-pemberdayaan-desas-saemaul-undong-ala-korea-selatan-dan-koperasi-desas-merah-putih-di-indonesia/>.

Wawancara

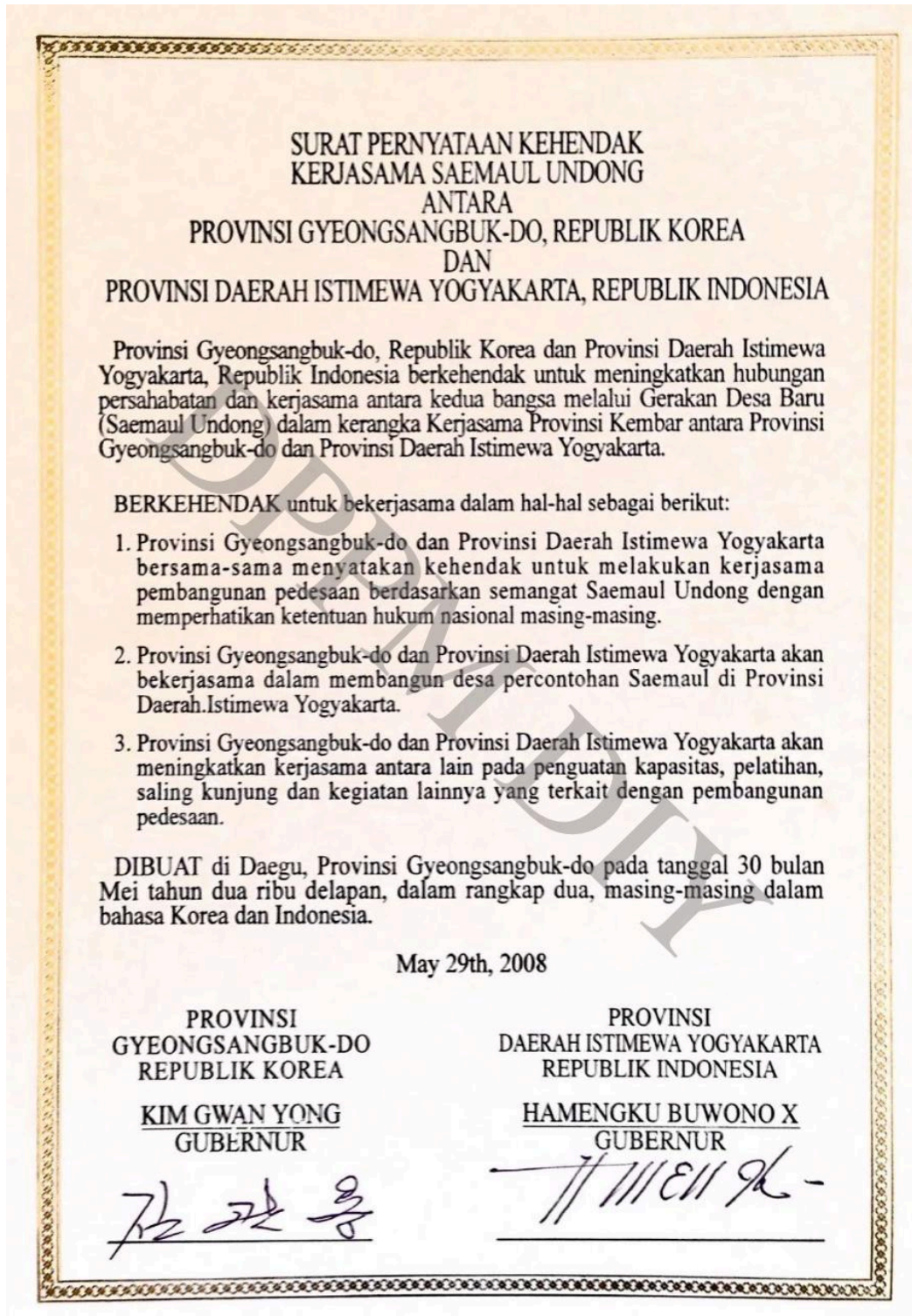
BAPPERIDA DIY. 2025. Wawancara Daring.

DPMPTSP DIY. 2026. Wawancara langsung.

YGSi. 2026. Wawancara Langsung.

LAMPIRAN

Lampiran 1. LoI Tahun 2008 sebagai Lanjutan *Sister City* DIY dan Gyeongsangbuk-do



Lampiran 2. MoU Sister City DIY dan Gyeongsangbuk-do

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH PROPINSI GYEONGSANGBUK-DO,
REPUBLIK KOREA
MENGENAI
KERJASAMA PROPINSI BERSAUDARA**

Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Republik Indonesia dan Pemerintah Propinsi Gyeongsangbuk-do, Republik Korea, selanjutnya disebut "Para Pihak";

BERKEINGINAN untuk meningkatkan hubungan kemitraan dan kerjasama yang baik antara Para Pihak;

MENYADARI pentingnya prinsip-prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan;

MERUJUK kepada Pernyataan Kehendak antara Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Republik Indonesia dan Pemerintah Propinsi Gyeongsangbuk-do, Republik Korea mengenai Kerjasama di Bidang Ekonomi, Pendidikan, Kebudayaan dan Seni, Pertanian, Pariwisata dan Kerajinan Tangan yang ditandatangani di Gyeongsangbuk pada tanggal 9 September 2003;

TUNDUK kepada peraturan, perundang-undangan dan prosedur administrasi yang berlaku dimasing-masing negara;

Telah menyetujui hal-hal berikut:

Pasal 1

Tujuan dan Ruang Lingkup Kerjasama

Para pihak akan membentuk Kerjasama Propinsi Bersaudara untuk meningkatkan dan mengembangkan kerjasama yang efektif dan saling menguntungkan dalam pembangunan kedua propinsi, dalam bidang-bidang sebagai berikut :

- | | | |
|---------------|------------------------|--|
| 1. Ekonomi | 3. Kebudayaan dan Seni | 5. Pariwisata |
| 2. Pendidikan | 4. Pertanian | 6. Perdagangan, Industri dan Investasi |

Pasal 2

Pembiayaan

Kegiatan-kegiatan yang diatur dalam Memorandum Saling Pengertian ini dilaksanakan atas ketersediaan dana, personil dan sumber-sumber lainnya yang tersedia dari Para Pihak.

Pasal 3
Pengaturan Teknis

Pelaksanaan kerjasama seperti tersebut dalam Pasal 1 Memorandum Saling Pengertian ini akan dilakukan melalui pengaturan khusus yang akan dibuat oleh Para Pihak.

Pasal 4
Kelompok Kerja Bersama

1. Para Pihak sepakat membentuk Kelompok Kerja Bersama untuk kegiatan-kegiatan dalam kerangka Memorandum Saling Pengertian ini yang bertugas menyusun kegiatan-kegiatan dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan kerjasama serta perlunya penjabaran atau pembahasan lebih lanjut kerjasama dimaksud;
2. Kelompok Kerja Bersama akan menyiapkan dan merekomendasikan kegiatan-kegiatan jangka pendek dan menengah;
3. Kelompok Kerja Bersama akan mengadakan pertemuan berkala, secara bergantian di Yogyakarta atau di Gyeongsangbuk-do. Dalam hal pertemuan berkala tidak dapat dilakukan karena suatu hal, Para Pihak akan melakukan pertukaran dokumen.

Pasal 5
Penyelesaian Perbedaan

Setiap perbedaan yang timbul dalam penafsiran atau pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi atau perundingan antara Para Pihak.

Pasal 6
Perubahan

Memorandum Saling Pengertian ini dapat diubah atau diperbaiki. Salah satu Pihak dapat mengajukan perbaikan atau perubahan secara tertulis. Setiap perubahan atau perbaikan yang telah disepakati oleh Para Pihak merupakan bagian tak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini. Perbaikan atau perubahan tersebut akan berlaku secara efektif pada tanggal yang disepakati oleh Para Pihak.

Pasal 7
Pemberlakuan, Masa Berlaku dan Pengakhiran

1. Memorandum Saling Pengertian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan;
2. Memorandum Saling Pengertian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya;

3. Apabila Memorandum Saling Pengertian ini berakhir, pengaturan-pengaturan atau kegiatan-kegiatan tetap akan berlaku hingga selesainya pengaturan-pengaturan atau kegiatan-kegiatan tersebut.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, telah diberi kuasa penuh oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.

DIBUAT dalam rangkap dua di Yogyakarta pada hari Kamis tanggal dua puluh empat bulan Pebruari tahun dua ribu lima, dalam bahasa Indonesia, Korea dan Inggris, semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran Memorandum Saling Pengertian ini, maka naskah bahasa Inggris yang digunakan.

UNTUK PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
REPUBLIK INDONESIA

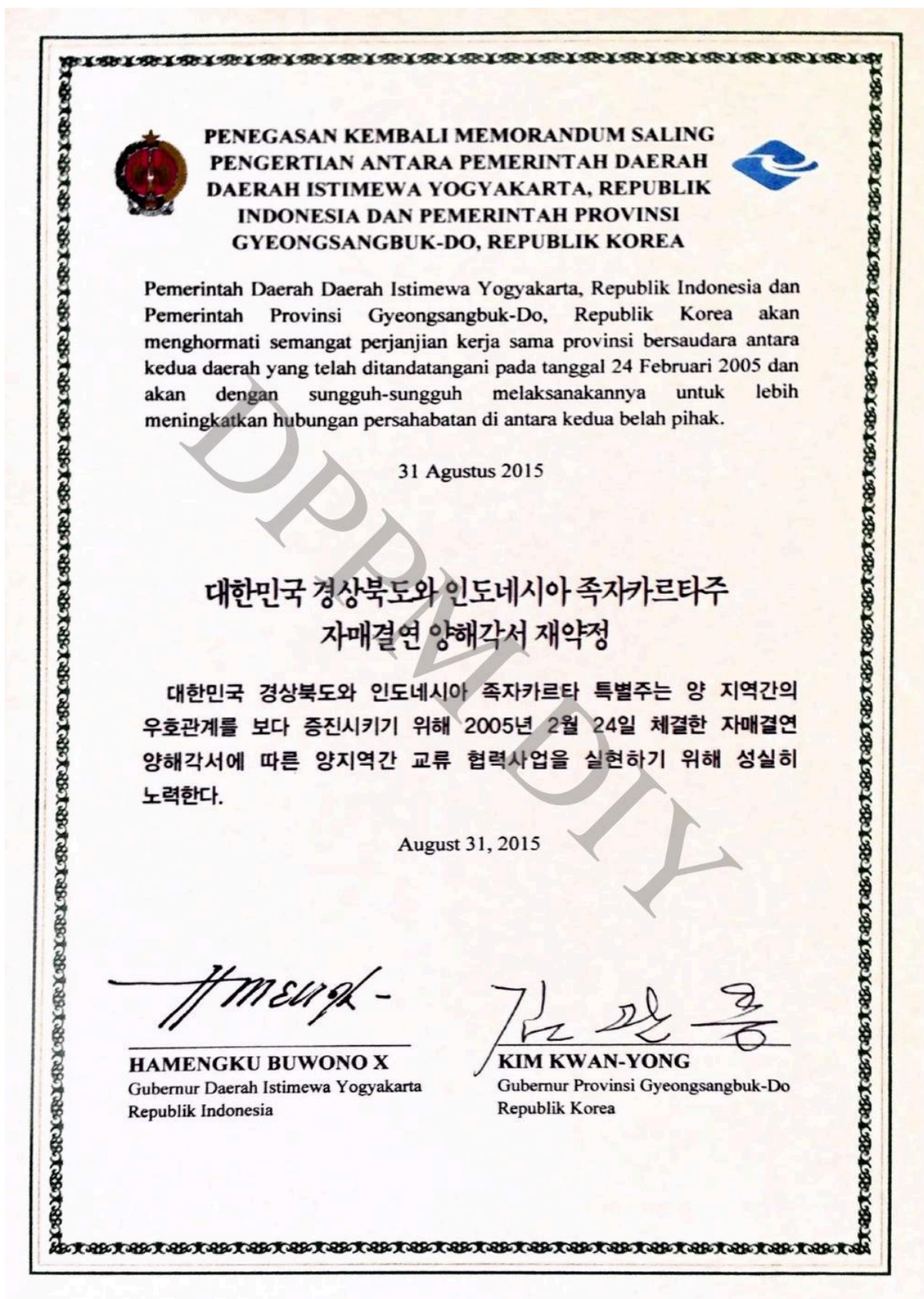


HAMENGKU BUWONO X
GUBERNUR

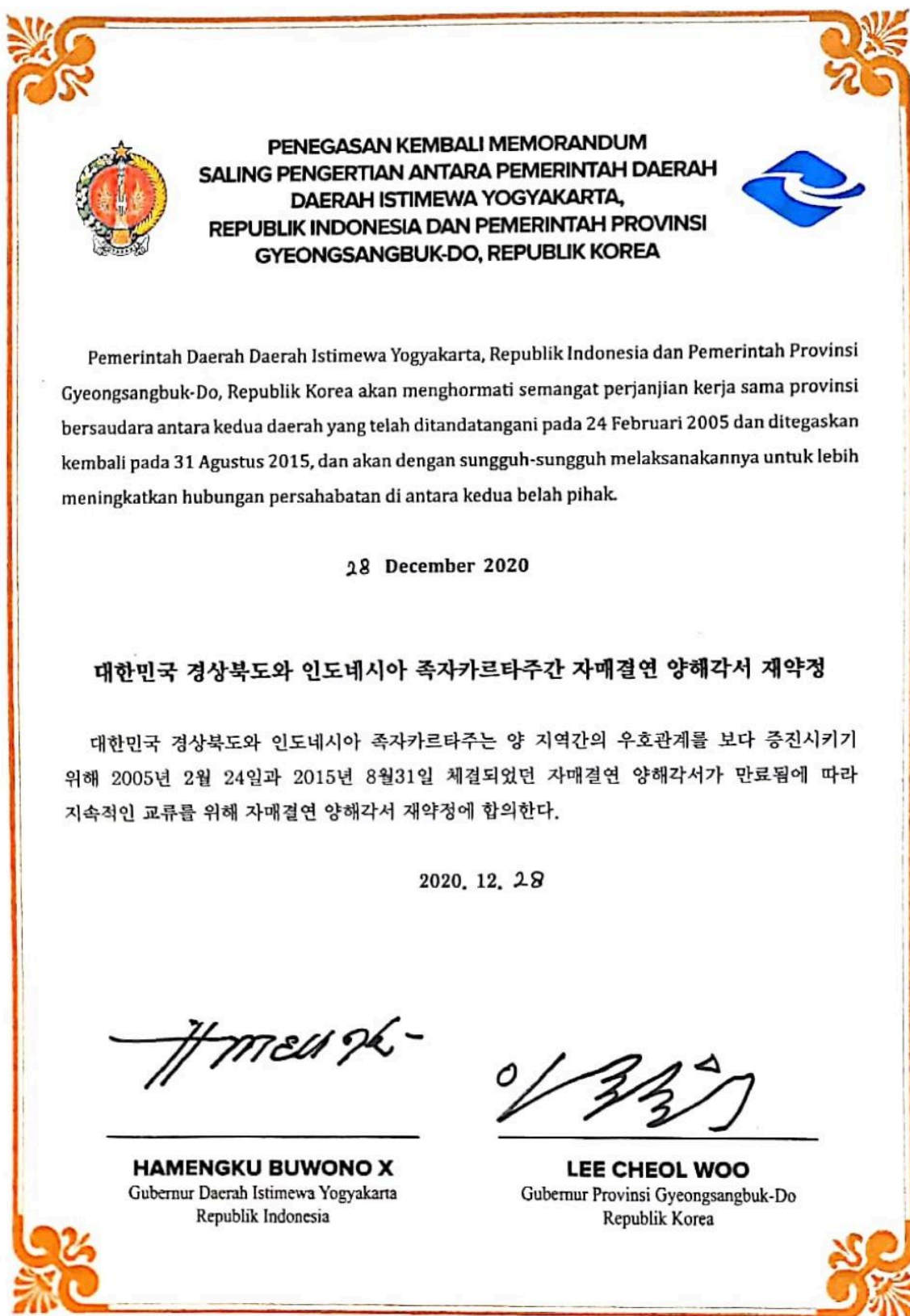
UNTUK PEMERINTAH PROPINSI
GYEONGSANGBUK-DO,
REPUBLIK KOREA



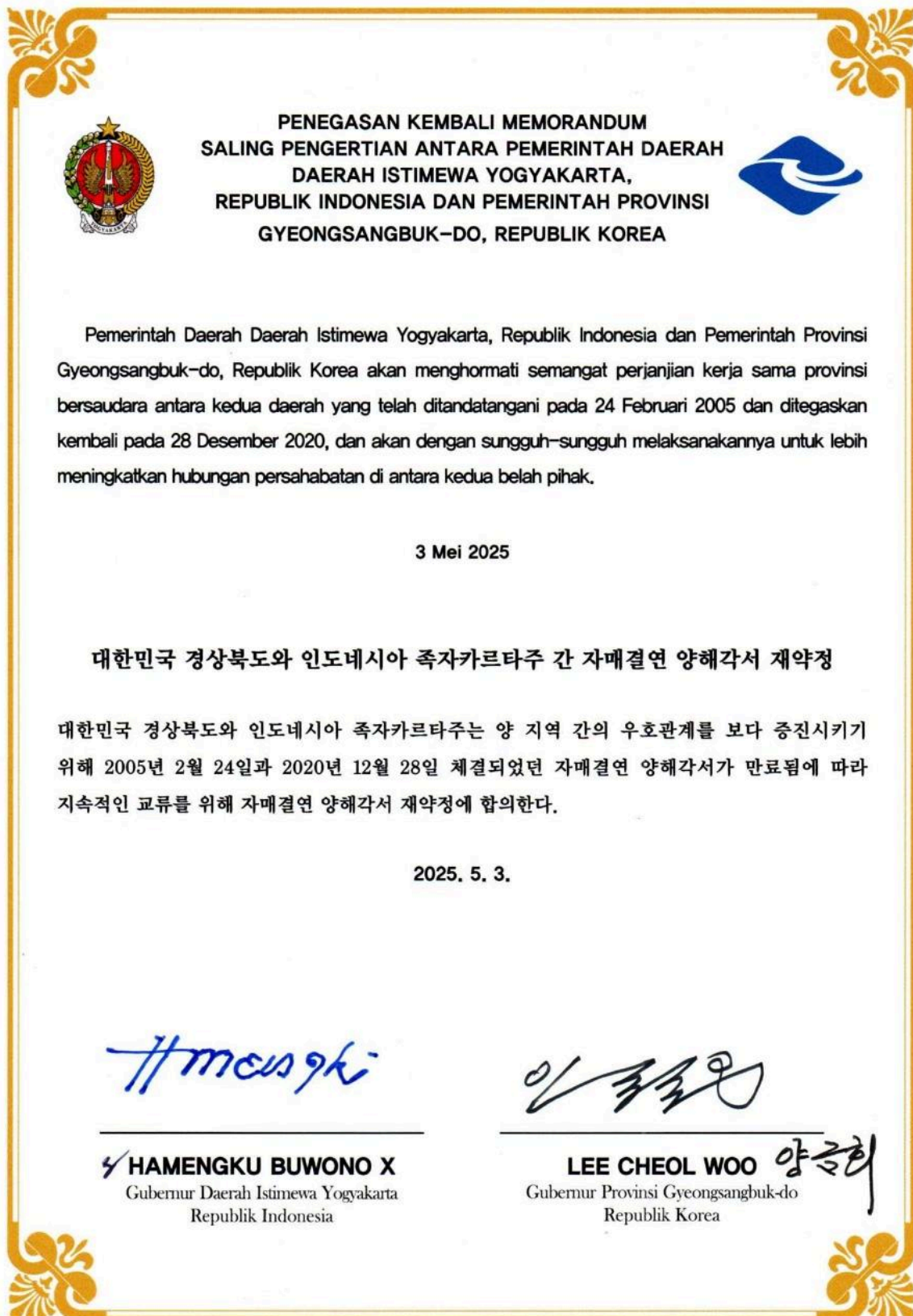
LEE, EUI GEUN
GUBERNUR



Lampiran 4. Reaffirmation MoU Sister Province DIY dan Gyeongsangbuk-do Tahun 2020



Lampiran 5. Reaffirmation MoU Sister Province DIY dan Gyeongsangbuk-do Tahun 2025



Lampiran 6. Surat Permohonan Izin Pengambilan Data Skripsi ke BAPPERIDA DIY



FAKULTAS
PSIKOLOGI

Gedung Dr. Soekarno Wijaya
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirejo km 14.5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 2158
F. (0274) 898444 ext. 2158
E. fpsi@uii.ac.id
W. psychology.uii.ac.id

Tanggal : 12/11/2025
Nomor : 2572/Dek/70/DAA/TA/XI/2025
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :
Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA)
Daerah Istimewa Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb,

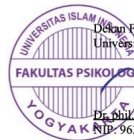
Dengan hormat,
Kami sampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia dengan identitas sebagai berikut,

Nama Mahasiswa : Yunita Dwi Septianingrum
Nomor Induk Mahasiswa : 22323218
Program Studi : Psikologi
Pembimbing : Hadza Min Fadhi Robby, S.IP, M.Sc.
Judul Skripsi : KERJASAMA SISTER CITY DIY DAN GYEONGSANGBUK-DO MELALUI PROGRAM SAEMAUL UNDONG SEBAGAI UPAYA PERWUJUDAN VISI MISI DAERAH 2022-2025

sedang dalam proses penyusunan Skripsi/Tugas Akhir dan memerlukan data/informasi dari instansi Bapak/Ibu/Saudara/i. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenannya untuk memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan guna keperluan penyusunan Skripsi/Tugas Akhir yang sedang ditempuh.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i kami sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



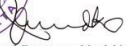
Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Islam Indonesia

Dr. Phil. Ouhadi Lufum, S.Psi., M.Si., Psikolog
NIP. 963200102

Lampiran 7. Dokumentasi Wawancara (*daring*) dengan BAPPERIDA DIY



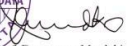
Lampiran 8. Surat Permohonan Izin Pengambilan Data Skripsi ke DPMPTSP DIY

	FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA Gedung Dr. Soekarno Wijaya Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584 T. (0274) 898444 ext. 2106 F. (0274) 898444 ext. 2106 E. fibs@uii.ac.id W. fibs.uii.ac.id
Tanggal	: 08/01/2026
Nomor	: 63/Dek/70/DAA.FISB/TA/I/2026
Hal	: Permohonan Izin Pengambilan Data Skripsi/Tugas Akhir
Kepada	: Yth. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DIY
Assalamualaikum Wr. Wb,	
Dengan hormat,	
Kami sampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia dengan identitas sebagai berikut,	
Nama Mahasiswa	: Yunita Dwi Septianingrum
Nomor Induk Mahasiswa	: 22323218
Program Studi	: Hubungan Internasional
Pembimbing	: Hadza Min Fdhi Robby, S.IP.,M.Sc.
Judul Skripsi	: KERJASAMA SISTER CITY DIY DAN GYEONGSANGBUK-DO MELALUI PROGRAM SAEMAUUL UNDONG SEBAGAI UPAYA PERWUJUDAN VISI MISI DAERAH 2022-2025
sedang dalam proses penyusunan Skripsi/Tugas Akhir dan memerlukan data/informasi dari instansi Bapak/Ibu/Saudara/i. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenannya untuk memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan guna keperluan penyusunan Skripsi/Tugas Akhir yang sedang ditempuh.	
Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i kami sampaikan terima kasih.	
Wassalamualaikum Wr. Wb.	
 Dekan Fakultas Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia  Prof. Dr. rer. soc. Masduki, S.Ag., M.Si. NIP. 043310104	

Lampiran 9. Dokumentasi Wawancara (langsung) dengan DPMPTSP DIY



Lampiran 10. Surat Permohonan Izin Pengambilan Data Skripsi ke YGSI

	FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA Gedung Dr. Soekirman Wijayandjaja Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia Jl. Klaten Raya No. 14, Yogyakarta 55584 T. (0274) 898444 ext. 2706 F. (0274) 898444 ext. 2706 E. fbsb@uii.ac.id W. fbsb.uii.ac.id
Tanggal	: 04/02/2026
Nomor	: 165/Dek/70/DAA.FISB/TA/II/2026
Hal	: Permohonan Izin Pengambilan Data Skripsi/Tugas Akhir
Kepada	: Yth. Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesia (YGSI)
Assalamualaikum Wr. Wb,	
Dengan hormat, Kami sampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia dengan identitas sebagai berikut,	
Nama Mahasiswa	: Yunita Dwi Septianingrum
Nomor Induk Mahasiswa	: 22323218
Program Studi	: Hubungan Internasional
Pembimbing	: Hadza Min Fadli Robby, S.IP.,M.Sc.
Judul Skripsi	: Paradiplomasi Pemerintah Daerah DIY melalui Kerjasama Sister City dengan Gyeongsangbuk-do dalam Kerangka Visi Misi Daerah 2022-2025
sedang dalam proses penyusunan Skripsi/Tugas Akhir dan memerlukan data/informasi dari instansi Bapak/Ibu/Saudara/i. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenannya untuk memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan guna keperluan penyusunan Skripsi/Tugas Akhir yang sedang ditempuh.	
Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i kami sampaikan terima kasih.	
Wassalamualaikum Wr. Wb.	
 Dekan Fakultas Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia  Prof. Dr. rer. soc. Masduki, S.Ag., M.Si. NIP. 043310104	

Lampiran 11. Dokumentasi Wawancara (langsung) dengan YGSI



Lampiran 12. Verbatim Wawancara (langsung)

dengan DPMPTSP DIY

P = Peneliti, Yunita Dwi Septianingrum

R = Responden, Fathi Mustaqim

Waktu = 29 Januari 2026

Tempat = Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY

Pelaku	Percakapan	Keterangan
P	Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh	<i>Opening</i>
R	Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh	<i>Greeting Response</i>
P	Perkenalkan nama saya Yunita Dwi Septianingrum dari prodi hubungan internasional Universitas Islam Indonesia. Sebelumnya saya mengucapkan terimakasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk dapat melakukan wawancara di DPMPTSP DIY guna melengkapi data dalam penelitian skripsi saya. Mohon maaf saat ini saya dengan bapak siapa?	<i>Introducing & Research Purpose</i>
R	Baik mba, dengan Fathi Mustaqim.	<i>Self-Identification</i>
P	Baik Bapak Fathi saya mulai dari pertanyaan pertama mengenai pembentukan badan khusus kerja sama internasional. Yang saya tanyakan bagaimana DPMPTSP DIY dalam mengelola kerja sama internasional khususnya dengan Gyeongsangbuk-do?	<i>Open-ended Question</i>
R	Jadi badan yang menangani kerja sama luar negeri di DIY sempat berganti beberapa kali sejak awal tahun 2000an. Pada awalnya oleh BAPPEDA, kemudian 2004 oleh Biro Kerja Sama, selain itu sejak tahun 2004 tersebut kepala kantornya juga berasal dari Kementerian Luar Negeri. Kemudian berubah menjadi BKPM, DPPM, baru setelah itu tahun 2019 oleh DPMPTSP bagian Kerja Sama Luar Negeri (KSLN). Kalau terkait dengan fungsinya, kami sebagai fasilitator atau pembuka komunikasi awal antara mitra serta menghubungkan dengan OPD	<i>Historical Explanation</i>

	teknis. Misalnya untuk <i>Saemaul Undong</i>, kita melakukan <i>chanelling</i> ke dinas pemberdayaan serta dinas pertanian. Namun, bukan berarti setelah itu kami lepas tangan. Kami juga selalu melakukan monitoring hingga evaluasi. DPMPTSP ini selain sebagai fasilitator, segala atribut yang berhubungan dengan kerja sama luar negeri termasuk dalam menerima kunjungan tamu dari luar negeri. Kami juga berkoordinasi dengan kementerian terkait misalnya dalam pembuatan <i>LoI</i> dan <i>MoU</i>.	
P	Baik bapak, tadi sempat disebutkan mengenai koordinasi dengan OPD teknis, lalu bagaimana mekanisme dalam koordinasi tersebut pak?	<i>Follow-up Question</i>
R	Iya kalau secara formal, mulai dari kami mengirim surat kemudian mengundang dalam rapat dalam melakukan diskusi siapa tau bisa dieksplor mengenai bidang lain seperti pertanian apa komoditasnya hortikultura atau tanaman pangan seperti itu.	<i>Coordination Explanation</i>
P	Kalau untuk prosedur atau pola kerja tertentu yang menunjukkan bahwa kerja sama antara kedua daerah ini terstruktur dan bersifat berkelanjutan?	<i>Probing Question</i>
R	Adanya <i>MoU</i> pada awalnya, kemudian setelah itu adanya penyusunan rencana kerja, <i>joint working group</i> yang mempertemukan DIY dengan Gyeongsangbuk-do setiap satu tahun sekali. Kalau dari DIY oleh seluruh <i>stakeholder</i> terkait, kemudian kita diskusi bareng, eeee....fungsinya yang pertama <i>memonitoring</i> program-program yang sudah berjalan, kedua <i>projecting</i> program-program kedepannya.	<i>Institutional Framework Explanation</i>
P	Untuk kerja sama ini apakah terdapat kantor perwakilan pak? Di Gyeongsangbuk-do atau di Korea Selatannya milik DIY, seperti itu pak.	<i>Clarification Question</i>
R	Maksudnya kantor DIY di luar negeri? Kantor DIY yang di Gyeongsangbuk-do atau kantor Gyeongsangbuk-do di DIY?	<i>Clarification</i>
P	Eeee....kantor DIY di Gyeongsangbuk-do pak.	<i>Clarification Response</i>
R	Oooo....kalau kantor DIY di Gyeongsangbuk-do di DIY nggak ada karena Indonesia memiliki kantor perwakilan. Jadi kalo di Gyeongsangbuk-donya langsung nggak ada, tapi adanya di Seoul itu sebagai KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Indonesia di Seoul Korea Selatan. Tetapi, kalau dari ini kan DIY dengan Gyeongsangbuk-do ini adalah	<i>Informative Response</i>

	kerja sama <i>sister province</i> nggih. <i>Sister province</i> ini dari Gyeongsangbuk-do menunjuk...sejak tahun 2015. Jadi gini dari awalnya udah tau ya kalo DIY dengan Gyeongsangbuk-do itu <i>LoI</i>-nya tahun 2003 lalu penandatanganan <i>MoU</i>-nya 2005 sudah tahu? Dari 2005 itu bekerjasama, awalnya adalah tentang pemberdayaan masyarakat ya. Dengan bantuan-bantuannya juga sudah tahu nggih ya nanti dikasih linknya itu di Bunga Rampai. Terus setelah itu 2015 baru bergabunglah Yayasan Globalisasi <i>Saemaul</i> Indonesia tahu nggak? Itu kan juga hasil dari kerja sama <i>sister province</i> antara DIY dengan Gyeongsangbuk-do. Gyeongsangbuk-do menunjuk <i>Saemaul Foundation</i>, <i>Saemaul Foundation</i> membentuk Yayasan Globalisasi <i>Saemaul</i> Indonesia untuk di Indonesia yang karena ada ada <i>sister province</i> di Yogyakarta ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi kalau dari pihak Gyeongsangbuk-do untuk program <i>sister province</i>-nya dengan DIY itu, mereka membentuk YGSI, Yayasan Globalisasi <i>Saemaul</i> Indonesia, yang <i>notabene</i> sangat aktif di DIY. Dari tahun pertama kerjasama hingga saat ini sangat aktif. Nah, untuk YGSI sendiri ini, eee.... mereka ini adalah perwakilan atau eee.... istilahnya utusan dari Gyeongsangbuk-do untuk melanjutkan program-program atau meneruskan program-program yang tujuannya adalah untuk kerja sama <i>sister province</i> tersebut. Terus dari YGSI ini, kebanyakan sih dari YGSI ya, programnya itu kebanyakan dari YGSI. Walaupun ada program-program lain, contohnya seperti nanti ada dari kabupaten Shong itu juga mau masuk, itu juga melalui YGSI. Lalu ada program lagi pengelolaan sampah, itu nanti dibantu YGSI, walaupun bukan dari YGSI, tetapi dari provinsi Gyeongsangbuk-do. Kabupaten Eshong ini juga termasuk di provinsi Gyeongsangbuk-do. Jadi memang betul, tidak hanya pemberdayaan masyarakat, tapi juga masuk ke tanah lain, seperti pertanian, pariwisata. Dan sekarang ini mereka mulai mendekati Lumbung Mataraman. Lumbung Mataraman itu sekarang ini kan juga, ini kan dek Tia 2022-2025 nih. Sedangkan Presiden Prabowo yang sekarang kan juga ada program ketahanan pangan. Nah, dari Lumbung Mataraman ini mendekati program Presiden yang sekarang. Untuk ketahanan pangan. Kayak mau membudidayakan kacang kedelai. Ini lagi proses ini dek, tapi belum disepakati ya, masih dalam proses. Masih dalam proses peninjauan. Seperti yang ditanyakan dek Tia tadi,	
--	--	--

	proses penjajakannya itu panjang. Kita interen dulu nih, interen antara karena perwakilan Gyeongsangbuk-do ini lewat YGSI, kita rapat dulu dengan YGSI... gini-gini... ohh mau dengan YGSI seperti ini, berarti dari Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu ini kan fasilitator. Oh, berarti dengan Dinas Pertanian. Oh, berarti dengan dinas eh... kelurahan. Oh, berarti dengan Dinas Lingkungan Hidup, misal begitu ya. Ada dinas-dinas yang berhubungan nih dengan program yang ingin ditawarkan untuk bekerja sama ini. Dari interen itu kita mulai menyurati ke dinas-dinas yang terkait. Menyurati dinas-dinas yang terkait, dinas-dinas yang terkait itu pasti akan eee... menjawab dengan positif. Pasti akan diterima dengan baik. Makanya kita terus rapat. Rapat itu juga dari perwakilan dari Gyeongsangbuk-do dalam hal ini YGSI juga ikut rapat. Lalu mereka presentasi, saling presentasi, oh ternyata bisa, oh ternyata enggak bisa, terus solusinya apa? Kami ini di DPMPTSP ini benar-benar sebagai fasilitator atau jembatan. Jadi menghubungkan antara dinas yang terkait dengan program yang akan dilakukan dari Gyeongsangbuk-do. Jadi pertanyaannya apakah ada perwakilan di Gyeongsangbuk-do? Kita enggak ada kalo di Gyeongsangbuk-do. Ada aturannya, berbeda kalau pemerintah daerah di luar negeri itu beberapa boleh membuat kantor perwakilan di negara lain gitu ya. Kaya Gyeong itu ada kantor perwakilan di Jakarta, terus Victoria juga ada di Jakarta. Termasuk Gyeongsangbuk-do ini sebenarnya ada yang di Jakarta, itu lebih ke kantor perdagangan. Kalau untuk khusus yang kerja sama dengan DIY, ya ada YGSI itu dibentuklah Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesia. Itu dia perpanjangkan tangan dari Saemaul pusatnya di Korea yang ada di Indonesia. Kebetulan kantor di Indonesia itu ada di Jogja, ada di Atma Jaya. Universitas Atma Jaya. Nanti kalau butuh <i>interview</i> nanti tak kasih nomor kontaknya ketua YGSI.	
P	Iya Pak, baik Pak.	<i>Acknowledgement</i>
R	Jadi itu akan kamu akan lebih detail lagi tentang YGSI. Dan yang perlu di <i>noted</i> tentang kesuksesan Saemaul di Jogja itu salah satunya karena ada YGSI. Kenapa? Karena kalau dari negara-negara lain dengan mitra-mitra lain biasanya kalau mereka punya program itu sifatnya hanya temporer. Sebulan, dua bulan, selesai satu <i>project</i>, sudah, atau hanya memberikan <i>grand</i> atau mengirim tenaga ahli	<i>Coordination Explanation</i>

	pelatihan, <i>one shot</i> selesai. Tapi dengan adanya YGSI ini eee.... Sepertinya Gyeongsangbuk-do pengen ini tu program Saemaulnya <i>sustain</i>. Jadi di kantor YGSI ini ada koordinator program, kemudian ada koordinator lapangan, itu terjun sampai ke lokasi desa. Sangat aktif. Dan mereka tidak akan melepas eee.... apa namanya desa tersebut sampai kemudian dia bisa mandiri sendiri. Bahkan secara periodik eee.... mereka Saemaul Indonesia ini menghadirkan relawan-relawan dari Korea untuk tinggal di desa.	
P	Eee... langsung ya Pak.	<i>Clarification Response</i>
R	Waktu di Bleberan itu tinggal, Gunung Kidul, termasuk Nanggulan juga tinggal. Mungkin nanti dimutuk juga akan ada yang tinggal. Nah itu mungkin yang bisa saya tambahkan tentang nilai <i>plus</i>. Keberadaan YGSI ini untuk memastikan program ini bisa benar-benar berjalan, <i>fruitful</i> hasilnya dan <i>sustain</i> bisa dilanjutkan. Program-program hasil kerjasama antara DIY dan Gyeongsangbuk-do itu memang melalui Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesia. Pokoknya sangat aktif.	<i>Informative Response</i>
P	Berarti ketiadaan kantor perwakilan Yogyakarta di Gyeongsangbuk-do itu enggak masalah karena adanya yang sudah dari YGSI yaa Pak yaa? Berarti untuk komunikasi dan koordinasinya tidak ada masalah, Pak?	<i>Clarification Question</i>
R	<i>Plus</i> ada kantor KBRI Seoul.	<i>Clarification Response</i>
P	Berarti untuk komunikasi dan koordinasinya tidak ada masalah, Pak?	<i>Probing Question</i>
R	Sangat tidak ada masalah. Selama ini tidak ada masalah. Makanya saya itu paling senang kalau ada mahasiswa yang meneliti Gyeongsangbuk-do, karena memang buktinya itu nyata, <i>real</i>, ada semua. Dan berhasilnya itu benar-benar positif yang menyentuh masyarakat langsung. Jika ada kendala, paling kendalanya malah di kami hehehe... Karena aturan baru dari kementerian akhirnya eee... kendalanya yang terjadi saat ini, kendala yang ada itu hanya rencana penggunaan tenaga kerja asing yang tertunda dikarenakan ada aturan baru dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kalau untuk lainnya itu, alhamdulillah koordinasinya bagus, karena memang betul melalui YGSI. Jadi apabila ada pejabat atau	<i>Informative Response</i>

	eee... relawan ataupun anggota dewan yang ingin berkunjung untuk membahas ataupun untuk melihat tindak lanjut kerjasama DIY dengan Gyeongsangbuk-do itu, selama ini memang melalui Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesia itu, YGSI. Yang <i>notabene</i> mereka memang sangat aktif dan sangat baik dalam menjaga relasi antara DIY dengan Gyeongsangbuk-do. Jadi walaupun di DIY ini enggak ada kantor yang di Gyeongsangbuk-do, tapi kami punya Kedutaan Besar Republik Indonesia yang <i>notabene</i> se Korea Selatan mereka bisa menyentuh wilayah itu. Dan mereka setiap tahunnya selalu rajin menanyakan bagaimana kerjasama ini. Dan setiap tahunnya kami juga melaporkan nggih. Jadi melaporkan kerjasama luar negeri setiap tahunnya itu ada ke Kementerian Dalam Negeri itu tidak hanya Gyeongsangbuk-do, tetapi semua kerja sama luar negeri yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta..	
P	Kalau yang tentang pemberdayaan yang disebutkan tadi, apakah itu juga termasuk pemberdayaan masyarakat, Pak? Jadi masyarakatnya apakah juga diberdayakan untuk bercocok tanam?	<i>Follow-up Question</i>
R	Iya, jadi <i>core</i>-nya itu tetap pemberdayaan masyarakat tapi dilihat desanya. Kok desanya ternyata lokasinya itu cocok untuk tempat wisata juga juga gitu. Ooo ya sudah ditambahkan. Tapi <i>core</i>-nya tetap harus partisipasi dari pemberdayaan masyarakat setempat itu yang harus kuat. Jadi memang pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan atau yang dilakukan pun tentang pemberdayaan masyarakat. Jadi memang sepenuhnya dari masyarakat untuk masyarakat oleh masyarakat. Jadi mereka ini hanya memberikan training-training, pelatihan-pelatihan juga termasuk terkait dengan pengeringan padi. Karena misalkan di daerah Nanggulan itu kok banyak orang yang nanam padi, mereka membangun lumbung padi yang dibantu dengan Pemda DIY juga dengan Bapak Gubernur. Dibikinkan pengeringan padi. Terus ternyata tempatnya cocok untuk pembudidayaan jamur yang di Bleberan. Akhirnya dibentuklah pembuatan pembudidayaan jamur. Nggak cuma dibudidayakan, tapi juga dipanen terus digoreng dijual. Akhirnya kan jadi perekonomian di masyarakat tersebut jadi meningkat. Mereka menjadi desa yang memiliki usaha atau bidang ekonomi yang meningkatkan perekonomian mereka. Cuman mumpung keinget, ini agak diluar pertanyaan nggak papa ya?	<i>Informative Response</i>

P	Ngga apa apa Pak.	<i>Acknowledgement</i>
R	Program desa percontohan Saemaul,itu memang banyak yang berperan adalah pihak Korea. Tapi sebenarnya <i>spirit</i> utamanya dari program Saemaul itu menjadi program stimulan. Jadi harapannya ada andil juga ya dari pemerintah daerah, dari provinsi, kabupaten maupun pemerintah desa. Jadi kayak misalnya yang sudah berlangsung, yang sudah selesai itu di desa Bleberan Gunung Kidul itu ada pengembangan budidaya jamur. Jadi memang dari pihak Saemaul itu memberikan pelatihan, kemudian membuat apa namanya, bangunan untuk pengolahan jamur. Mulai dari menyiapkan backlog, backlog itu media tanam, media tanam, kemudian pengolahannya sampai masak sampai selesai. Tapi kemudian dari pemerintah daerah itu juga ada andil. Misalnya Pak Gubernur itu memberikan hibah dua kumbung jamur. Kumbung itu kayak <i>greenhouse</i> untuk jamur itu dua. Jadi ada andil lah. Kemudian misalnya dengan pembangunan jamur center di Nanggulan Kulon Progo, itu kan... udah pernah kesana belum?	<i>Informative Response</i>
P	Belum Pak.	<i>Short Answer</i>
R	Di Bleberan juga belum pernah?	<i>Short Question</i>
P	Belum pernah hehehe...	<i>Short Answer</i>
R	Nanti bisa kapan-kapan. Itu pembangunan kumbung jamurnya itu kan ada di agak bawah gitu ya. Kemudian ada potensi longsor di bawah jalan. Kemudian Pemprov dan Pemkab itu turut andil nyumbang bikin <i>retaining wall</i> , dinding penahan tanah biar nggak longsor gitu lho. Kayak kalau di pinggir sungai itu kan ada yang batu-batu disemen itu. Biar aman kumbungnya. Artinya tidak <i>fully</i> 100% dari Korea, tapi juga kedua belah pihak. Dan sebenarnya itu yang diinginkan oleh Korea. Ada kolaborasi itu. Dan biar kedepannya ada rasa memilikinya gitu.	<i>Informative Response</i>
P	Kalau untuk kerjasama ini berarti kan ada kunjungan ya, Pak? Kunjungan dari DIY ke Gyeongsangbuk-do dan juga Gyeongsangbuk-do ke DIY. Itu bentuknya dan tujuannya biasanya seperti apa ya, Pak?	<i>Follow-up Question</i>
R	Waktu masa-masa awal itu sifatnya penjajakan. Jadi kayak sebelum jadian kan pengen tahu nih calonnya kayak gimana hahaha.... Misalnya, cuman dapat	<i>Informative Response</i>

	biodata. Terus kita baca profilnya seperti ini. Terus kita bakal buktikan, benar nggak sih di sana seperti itu. Akhirnya dari DIY datang ke sana, melihat langsung, ketemu dengan orangnya. Dari Korea juga ke sini untuk <i>profiling</i> secara langsung, terus lihat orangnya, kira-kira bisa diajak kerjasama nggak sih potensial untuk lanjut atau enggak gitu.	
P	Berarti itu sebelum <i>MoU</i> -nya ya, Pak?	<i>Clarification Question</i>
R	Sebelum <i>MoU</i> iya, sesudah <i>MoU</i> pun iya. Ada beberapa dek tadi. Kalau untuk kunjungan itu ada beberapa, kalau dari pihak kita lah, dari pihak pemerintah, jelas perjalanan dinas. Tetapi kalau mereka itu juga menawarkan kayak <i>short course-short course</i> itu, ada yang enam bulan, ada yang dua minggu. Nah itu tuh, tapi itu dulu, itu dulu dan mulai aktif kembali baru-baru ini ya. Kalo khusus Saemaul dulu pernah juga ada beberapa program dan beberapa petani lokal, petani lokal, petani biasa. Diberangkatkan ke sana selama satu minggu untuk ikut pelatihan terkait Saemaul. Setelah Covid belum ada lagi pelatihannya. Kalau untuk yang dari Koreanya mungkin yang peringatan 10 tahun 20 tahun kemarin yang <i>Korean Day</i> .	<i>Clarification Response</i>
P	Kalau untuk dalam kerjasama ini dan juga dalam kunjungan itu yang baru-baru dilaksanakan, sejauh mana Pak untuk pembahasan tentang kerjasama ini? Seperti tadi kan yang baru dilaksanakan tentang pertanian, seperti itu. Sejauh mana Pak?	<i>Probing Question</i>
R	Maksudnya hasil kunjungan terakhir ya?	<i>Clarification Question</i>
P	Iya Pak betul.	<i>Confirmation</i>
R	Tindak lanjutnya, jadi kalau kunjungan terakhir berarti yang itu direktur utamanya Wakil Gubernur, kalau yang nilainya lebih tinggi. Tapi kan itu untuk perayaan 10 tahun. Jadi pas perayaan 10 tahunpun itu sudah ada pembahasan tentang program apa lagi nih yang bisa dieksplor yang bisa didorong. Sempat tercetus itu waktu itu adalah tentang pengembangan digital. Jadi semacam pelatihan <i>IT</i> untuk perangkat desa. Nah itu mendukung juga visi misi Gubernur untuk reformasi kalurahan. Reformasi kalurahan itu kan salah satunya <i>public service</i> yang layanan untuk masyarakat. Nah kalau misalnya perangkat desa sudah mulai <i>IT</i> , bisnis prosesnya di sana kan jadi lebih bagus ya. Jadi tidak konvensional lagi, bisa di	<i>Program Development Explanation</i>

	<i>modernize</i> , bisa memajukan masyarakat desa.	
P	Tapi yang untuk program ini belum terlaksana ya Pak?	<i>Follow-up Question</i>
R	Bisa dibilang bisa, eee... sudah ya. Karena di Nanggulan, selain ada kelas komputer, mereka bikin kelas pelatihan bahasa Korea. Pesertanya umum memang, tapi ada beberapa dari perangkat desa yang biasa juga. Nanti yang di desa baru di daerah Muntuk itu juga selain pengembangan <i>agro-tourism</i> juga dibikin ruangan menggunakan bangunan yang sudah ada milik pemerintah setempat di permak menjadi kelas untuk pelatihan bahasa dan komputer.	<i>Clarification Question</i>
P	Selanjutnya adalah pertanyaan tentang partisipasi kegiatan internasional, Pak. Apakah Gyeongsangbuk-do pernah memiliki kegiatan internasional yang juga DIY turut berpartisipasi gitu, Pak?	<i>Open-ended Question</i>
R	Harus spesifik Gyeong atau nggak?	<i>Clarification Question</i>
P	Emm... iya Pak khusus Gyeongsangbuk-do terkait <i>Saemaul Undong</i> .	<i>Clarification Response</i>
R	Ooo <i>Saemaul Undong</i> . Ya paling pelatihan itu hahaha... Oh ini <i>FoY</i> ? Dari mana ya? Jadi kan gini dek. Sebenarnya ini adalah <i>international event</i> ya, di DIY. Jadi memang <i>Friends of Yogyakarta</i> ini awal mula jadi pelaksanaan pertama. Itu programnya, programnya dana keistimewaan, yang didanai oleh dana keistimewaan, programnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu ada <i>Friends of Yogyakarta</i> yang diadakan setiap dua tahun sekali. Yang pertama kali diadakan <i>Friends of Yogyakarta</i> di tahun 2024. <i>Friends of Yogyakarta</i> ini adalah ibarat kata ucapan terima kasih dari Pemda DIY kepada para mitra-mitra kerja sama luar negeri di DIY. Salah satunya adalah mitranya itu adalah Gyeongsangbuk-do. Dan <i>Friends of Yogyakarta</i> ini, pesertanya ini terdiri dari mitra-mitra kerja sama luar negeri yang <i>notabene</i> ada enam dan negara-negara lain sekitar yang memiliki potensi untuk bisa bekerja sama di DIY. Gyeongsangbuk-do salah satu pesertanya dan memang sangat aktif. Itu oleh karenanya menjadi salah satu produknya DIY untuk program internasional. Kalau dari pihak Gyeongsangbuk-do itu sebenarnya mereka banyak	<i>Informative Response</i>

	<i>event</i>, tetapi mungkin dari pihak Pemda DIY yang kemarin-kemarin ini kan ada efisiensi ya. Jadi segala kegiatan yang berbentuk internasional itu kita kurang-kurangi. Jadi untuk terakhir yang terjadi adalah ya <i>Friends of Yogyakarta</i> itu yang <i>notabene</i> di tahun ini akan ada lagi <i>Friends of Yogyakarta</i>. Setiap dua tahun sekali. Kirim. Jadi kalau di itu bukan lingkup Saemaul, tapi di Gyeongsangbuk-do sendiri memang ada menyelenggarakan pelatihan bahasa Korea untuk ASN dari negara Sahabat. Jadi kemarin itu kami mengirim enam orang untuk pergi ke sana belajar bahasa Korea selama dua minggu bersama ASN dari negara-negara sahabat lain di Korea Selatan.	
P	Kalau untuk yang acara atau <i>event Friends of Yogyakarta</i> tadi berarti tidak spesifik program <i>Saemaul Undong</i> ya Pak?	<i>Clarification Question</i>
R	Tidak. Jadi, <i>Friends of Yogyakarta</i> ini, <i>basic</i>-nya adalah ucapan terima kasih dari DIY, maka acaranya ini diisi dengan pelatihan bahasa Indonesia, lalu memperkenalkan DIY dengan lebih dekat lagi, baik pariwisatanya, budayanya, tempat wisatanya, ekonomi kreatifnya, di dalamnya ada UMKM-nya, ada desa wisatanya. Jadi lebih memperkenalkan DIY yang apa aja yang dimiliki keistimewaan di DIY ini apa saja. Jadi memang tidak hanya untuk Gyeongsangbuk-do, tetapi untuk mitra-mitra kerjasama yang salah satunya Gyeongsangbuk-do dengan negara-negara yang memiliki potensi untuk bisa bekerjasama dengan DIY.	<i>Clarification Response</i>
P	Berarti dalam <i>event</i> ini juga apakah untuk kesempatan DIY memperkenalkan lebih dalam itu untuk kemungkinan akan ada penjajakan baru?	<i>Probing Question</i>
R	Nggih. Kalau yang ditanya, ada nggak yang fokus kepada Gyeongsangbuk-do, yang fokus kepada Gyeongsangbuk-do adalah di tahun 2025 itu <i>Korean Day</i> itu. Itu <i>Korean Day</i> itu memang fokus kepada Gyeongsangbuk-do. Karena <i>Korean Day</i> itu adalah perayaan 10 tahun kerjasama antara DIY dan Gyeongsangbuk-do yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Gyeongsangbuk-do. Mereka beserta rombongannya dengan pejabat-pejabat di jajarannya dengan pengusaha-pengusaha ataupun warga Korea Selatan yang berada di DIY dan sekitarnya. Melalui acara <i>Korean Day</i> itu. Nah, kalau <i>Korean Day</i> memang benar-benar fokus ditujukan kepada DIY	<i>Informative Response</i>

	Gyeongsangbuk-do. Memang untuk Gyeongsangbuk-do.	
P	Kalau untuk kerja sama yang lain, DIY apakah mempunyai hubungan kerja sama dengan mitra selain Geongsangbuk-do dalam pemberdayaan masyarakat, Pak?	<i>Probing Question</i>
R	Mungkin kalau secara spesifik pemberdayaan masyarakat tidak, tetapi yang efeknya memberdayakan masyarakat ada beberapa. Contohnya misalnya dengan Yamanashi itu ada kerjasama di bidang pembudidayaan stroberi dan itu beberapa kali tenaga ahlinya dari Jepang itu datang ke sini ngasih pelatihan ke teman-teman di Dinas Pertanian, beberapa petani. Atau juga mereka mengundang peserta dari Jogja untuk ngikutin pelatihan di sana. Dan efeknya juga jadi berkembang komunitas petani anggur, petani stroberi. Kayak di Bantul itu kan ada beberapa desa wisata yang petik anggur. Nah itu salah satu yang sekarang pelatihan Yamanashi.	<i>Informative Response</i>
P	Berarti untuk yang seperti khusus pembangunan desa gitu, memang Saemaul ya, Pak. Kalau untuk yang pertanian stroberi dan anggur tadi di tahun berapa ya, Pak?	<i>Probing Question</i>
R	Itu sebelum Covid dengan yang Yamanashi mereka itu Jepang. Oh dengan Gyeongsangbuk-do juga selain Saemaul, ada juga pelatihan petani <i>millennial</i> . Jadi ada beberapa petani milenial dari Jogja itu pas sebelum Covid. Kalau nggak salah tahun 2019. Itu di undang ke Gyeong untuk studi banding pengelolaan <i>modern farming</i> .	<i>Informative Response</i>
P	Kalau dari DIY-nya sendiri apakah juga terlibat dalam jaringan global? Seperti yang memang khusus untuk pembangunan desa atau pemberdayaan masyarakat yang berisi negara-negara lain yang fokus.	<i>Probing Question</i>
R	Kalau yang saya tahu yang Pemkot itu ada jaringan kota-kota kreatif. Tapi internasional. Kalau yang tingkat provinsi mestinya ada, cuma kami perlu cek lagi. Jadi ada kongres Nara. Pendeknya ya, tapi kalau nama lengkapnya itu <i>EARLGC, East Asia Regional and Local Government Congress</i> . Inisiatornya pemerintah prefektur Nara. Sehingga dipanggil disingkatnya <i>Nara Congress</i> . Ini sebenarnya pertemuan tahunan beberapa pemerintah daerah, baik	<i>Informative Response</i>

	tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi. Tempatnya juga diganti. Di antara negara-negara anggota untuk sharing best practice pengelolaan <i>public service</i> di wilayah masing-masing. Kalau dari Indonesia yang menjadi anggotanya Pemprov DIY dan Pemprov Jabar.	
P	Tapi masih berjalan ya, Pak?	<i>Clarification Question</i>
R	Masih. Setiap tahun diundang. Cuma karena efisiensi jadi belum bisa. Setiap tahun. Terakhir datang itu tahun 2023. Karena dilaksanakannya di Bandung hahaha... Kalau untuk DIY ya, internasionalnya salah satunya Nara. Kalau yang lainnya mungkin nanti bisa tanya ke Dinas Ya.	<i>Clarification Response</i>
P	Selanjutnya, Pak, karena penelitian saya juga ada membahas tentang visi misi daerah 2022-2025, apakah kerja sama yang dilakukan ini antara Gyeongsangbuk-do dan DIY ini arah kebijakannya berbeda dari periode yang sebelumnya, Pak? Programnya. Jadi penyesuaian fokus kerjasamanya apakah berbeda dari sebelum tahun 2022?	<i>Open-ended Question</i>
R	Yang berbeda maksudnya program Saemaul atau visi misi daerahnya?	<i>Clarification Question</i>
P	Fokusnya, Pak.	<i>Clarification Response</i>
R	Kalau fokusnya sih tetap sama ya. Cuma yang berbeda itu kemudian lokasi. Lokasi pelaksanaannya biasanya berbeda. Tapi jadi <i>guideline</i> visi misi daerahnya. Kalau di visi misi itu kan pemberdayaan masyarakat kawasan selatan. Nah, makanya kemudian yang dipilih adalah daerah selatan. Di Bantul, Kulonprogo, Gunung Kidul seperti itu. Itu menjadi <i>guideline</i> untuk penentuan lokasi sama apa namanya, fokus bidang yang dilaksanakan. Kalau penerjemahan fokusnya ini, asta cita ya, satunya ketahanan pangan, yang kemudian di fokuskan juga di Saemaul untuk bidang pertanian.	<i>Informative Response</i>
P	Kalau selain fokus untuk pemilihan kawasan tempat pemberdayaan itu Pak, atau tempat program itu, DPMPSTP sendiri, bagaimana cara memastikan agar kerjasama ini tetap searah dengan visi misinya di Yogyakarta?	<i>Probing Question</i>
R	Ya, sebelum dilaksanakan program ini, itu kan kami sudah koordinasi baik dengan YGSI sebagai	<i>Informative Response</i>

	perpanjangan tangan Gyeongsangbuk-do dan Saemaul di Korea juga dengan pemerintah kabupaten yang nanti akan jadi lokasi pelaksanaan program Saemaul. Jadi di forum-forum seperti itu kemudian kami menjadi <i>gatekeeper</i> agar programnya nanti sejalan, searah dengan visi misi.	
P	Untuk pertanyaan terakhir Pak, apakah ada informasi atau penjelasan lain yang kira-kira belum dibahas, tetapi penting untuk disampaikan terkait dengan Gyeongsangbuk-do dan DIY ini dalam program <i>Saemaul Undong</i> , Pak?	<i>Probing Question</i>
R	Ya, saya <i>highlight</i> tadi tentang pendampingan itu. Itu yang menjadi, yang bisa di- <i>take note</i> , bisa di- <i>highlight</i> . Salah satu hal yang menjadi kunci keberhasilan Saemaul disini adalah keberadaan YGSI. Sebelum sampai ke lokasi, bahkan bikin kantor di sana. Jadi itu fungsinya adalah untuk mengawal program koordinasi dengan pemerintah desa, petaninya langsung, ke Poktan (Kelompok Tani), gabungan Poktan. Jadi warga desa beneran lah, jadi mereka benar-benar mencoba menyerap atmosfer desa, kemudian aspirasi masyarakat desa, jadi benar-benar. Programnya itu tidak hanya dijalankan oleh Saemaul, tapi juga oleh masyarakat desa. Karena kalau program desa YGSI di satu desa ini paling tiga maksimal lima tahun. Setelah itu kan nanti ditinggal, dilepas karena nanti yang dianggap masyarakat mandiri untuk bisa melaksanakan kegiatan itu tanpa bantuan. Setelah dilepaskan itu juga dihibahkan ke desa, jadi yang mengelola selanjutnya adalah desa. Tapi untuk dari YGSI pun tetap masih istilahnya <i>monitoring</i> ya. Jadi ini berhasil enggak sih ini setelah kita tinggal ini, apakah programnya terus apa enggak. Jadi YGSI setelah lima tahun itu masih memantau, tidak dilepas langsung.	<i>Informative Response</i>
P	Baik, Bapak. Terima kasih ya, Pak. Apabila boleh, saya nanti minta di-share untuk dokumen-dokumen seperti <i>MoU</i> . Terima kasih banyak, Bapak-bapak dan juga kakak-kakak untuk hari ini sudah membantu saya untuk mendapatkan data untuk penelitian saya. Bila ada salah kata atau salah perbuatan juga saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.	<i>Closing Statement</i>
R	Walaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh, kalau masih ada yang ingin ditanyakan dan baru kepikiran boleh ditanyakan melalui Whatsapp.	<i>Closing Response</i>